

ILMU POLITIK

H. MUHDI, M,SI

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab UIN Sunan Ampel Surabaya



Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and
Islamic Development Bank (IDB)

STUDI ILMU POLITIK

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:
H. Muhdi, M.Si

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)



STUDI ILMU POLITIK

Penulis:
H. Muhdi, M.Si
Editor:
Rochimah, M.Fil.I

Cet.1- Surabaya: UIN SA Press,
November 2014

vi+ 84 hlm 17 x 24 cm

ISBN : 978-602-7912-99-1

Cover :
Anwari Abdullah

Diterbitkan :
UIN Sunan Ampel Press
Anggota IKAPI
Gedung SAC.Lt.2 UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
☎(031) 8410298-ext. 138
Email : sunanampelpress@yahoo.co.id

Dicetak :
CV. Cahaya Intan XII
Komplek Ruko GRAHA ANGGREK MAS REGENCY No. A-01
Jl. Raya Pagerwojo-SIDOARJO
☎(031) 8070 603
Email : cahayaintanxii@yahoo.com

Copyright © 2014, UIN Sunan Ampel Press (UIN SA Press)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Workshop on Writing Textbooks for Specialization Courses* dan *Workshop on Writing Textbooks for vocational Courses* bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul **Studi Ilmu Politik** ini merupakan salah satu di antara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan kebudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya
Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang dengan segala kuasanya buku perkuliahan Studi Ilmu Politik ini bisa hadir sebagai salah satu materi perkuliahan pilihan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Studi Ilmu Politik. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 1. Definisi, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik, 2. Konsep-konsep Politik, 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, 4. Kekuasaan politik, 5. Kewenangan dan Legitimasi, 6. Partai Politik, 7. Perilaku dan Partisipasi Politik, 8. Model-model sistem politik, 9. Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Studi Ilmu Politik. Demi kesempurnaan buku ini, dengan senang hati kami terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif sehingga kehadiran buku ini menjadi lebih baik.

Terima Kasih.

Penulis

H. Muhdi, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku
Perkuliahan “Studi Ilmu Politik” adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	’
14	ص	ṣ	ي	y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas ā, ī, dan ū (ا, ي, dan و). Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “au” seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Rektor	iii
Prakata	iv
Pedoman Transliterasi	v
Daftar Isi	vi
Satuan Acara Perkuliahan	vii

ISI PAKET

Paket 1: Definisi, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik	1
Paket 2: Konsep-konsep Politik	13
Paket 3: Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya	25
Paket 4: Kekuasaan politik	36
Paket 5: Kewenangan dan Legitimasi	49
Paket 6: Partai Politik	60
Paket 7: Perilaku dan Partisipasi Politik	75
Paket 8: Model-model sistem politik	85
Paket 9: Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial	96

PENUTUP

Sistem Evaluasi dan Penilaian	106
Daftar Pustaka	109
CV Penulis	110

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Identitas

Nama Mata kuliah	: Studi Ilmu Politik
Jurusan	: Sejarah dan Kebudayaan Islam (Adab)
Bobot	: 2 sks
Waktu	: 2 x 50 menit/ Pertemuan
Kelompok Matakuliah	: Pilihan

2. Deskripsi

Mata kuliah ini membelajarkan mahasiswa-mahasiswi untuk memahami dan mendeskripsikan beberapa materi pokok sebagai berikut :

- Definisi, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik
- Konsep-konsep Politik
- Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya
- Kekuasaan politik
- Kewenangan dan Legitimasi
- Partai Politik
- Perilaku dan Partisipasi Politik
- Model-model sistem politik
- Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial

3. Urgensi

Mengingat mata kuliah ilmu politik ini diajarkan pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, maka ilmu mata kuliah ini sangat penting untuk mendasari dan mendalami sejarah dan kebudayaan Islam. Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau. Oleh karena sejarah identik dengan politik, maka sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksi serta peranannya dalam usahanya memperoleh jawaban atas konsep “who get what, when and how (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana)”. Pernyataan ini harus dipahami bahwa sejarah yang dimaksud disini lebih menyoroti dari dimensi politik seperti yang lazim dihadapi rezim terdahulu sewaktu sejarah politik masih dominan dalam penulisan sejarah. Oleh karena sejarah dan kebudayaan Islam sangat erat kaitannya dengan aktifitas dan fenomena politik, maka mata kuliah ilmu politik menjadi sangat penting.

Urgensitas mata kuliah ini bagi mahasiswa adalah sebagai “pisau analisis” khususnya dalam proses penulisan skripsi sebagai tugas akhir dari calon sarjana humaniora.

4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi

No	KD	Indikator	Materi
1	Mendeskripsikan tentang Definisi, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dg baik ttg : a. Definisi ilmu politik b. Ruang lingkup IP c. Perkembangan IP d. Kegunaan ilmu politik bagi sejarah	a. Definisi ilmu politik b. Ruang lingkup ilmu politik c. Perkembangan ilmu politik (non-mandiri ke mandiri) d. Kegunaan ilmu politik bagi sejarah
2	Mendeskripsikan Konsep-konsep Politik	Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik ttg a. Teori politik b. Masyarakat c. Kekuasaan b. Negara dengan unsur unsurnya c. Sifat,tujuan & fungsinya	a. Teori politik b. Masyarakat c. Kekuasaan d. Negara e. Definisi negara f. Sifat negara g. Unsur-unsur negara h. Tujuan dan fungsi negara
3	Mendeskripsikan Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya.	Mahasiswa mampu mendeskripsikan kembali tentang keterkaitan ilmu politik dengan beragam ilmu pengetahuan secara komprehensif tentang : a. Sejarah b. Filsafat c. Ilmu politik dg Ilmu-ilmu sosial d. Ilmu ekonomi e. Psikologi sosial	a. IP dg Sejarah b. IP dg Filsafat c. Ilmu politik dg Ilmu-ilmu sosial d. IP dg Ilmu ekonomi e. IP dg Psikologi sosial
4	Mendeskripsikan tentang kekuasaan politik	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang a. Pengertian Kekuasaan Politik	a. Definisi kekuasaan politik b. Dimensi kekuasaan c. Pelaksanaan

		<ul style="list-style-type: none"> b. Dimensi KP c. Pelaksanaan KP d. Distribusi KP serta e. Kekuasaan versi budaya Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> kekuasaan politik d. Distribusi kekuasaan e. Kekuasaan menurut budaya Jawa
5	Mendeskripsikan Kewenangan dan Legitimasi	<p>Mahasiswa mampu mendeskripsikan dengan baik dan komprehensif tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Sumber kewenangan b. Peralihan kewenangan c. Sikap terhadap kewenangan d. Pengertian Legitimasi e. Objek legitimasi f. Kadar legitimasi g. Cara mendapatkan legitimasi h. Tipe-tipe legitimasi i. Krisis legitimasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Sumber kewenangan b. Peralihan kewenangan c. Sikap terhadap kewenangan d. Pengertian Legitimasi e. Objek legitimasi f. Kadar legitimasi g. Cara mendapatkan legitimasi h. Tipe-tipe legitimasi i. Krisis legitimasi
6	Mendeskripsikan tentang Partai Politik	<p>Mahasiswa mampu mendeskripsikan dengan baik dan komprehensif tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Partai Politik b. Asal usul dan ciri partai politik c. Fungsi partai politik d. Tipologi partai politik e. Sistem kepartaian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Partai Politik b. Asal usul dan ciri partai politik c. Fungsi partai politik d. Tipologi partai politik e. Sistem kepartaian
7	Mendeskripsikan tentang Perilaku dan Partisipasi Politik	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian perilaku Politik b. Model-model politik c. Pemimpin politik d. Pengertian Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian perilaku Politik b. Model-model politik c. Pemimpin politik d. Pengertian Partisipasi politik e. Tipologi partisipasi politik

		<p>politik</p> <p>e. Tipologi partisipasi politik</p> <p>f. Model partisipasi politik</p> <p>g. Perilaku memilih</p>	<p>f. Model partisipasi politik</p> <p>g. Perilaku memilih</p>
8	Mendeskripsikan model-model sistem politik	<p>Mahasiswa mampu mengilustrasikan dengan baik tentang :</p> <p>a. Sistem politik otokrasi tradisional</p> <p>b. Sistem politik totaliter</p> <p>c. Sistem politik komunis</p> <p>d. Sistem politik demokrasi</p>	<p>a. Sistem politik otokrasi tradisional</p> <p>b. Sistem politik totaliter</p> <p>c. Sistem politik komunis</p> <p>d. Sistem politik demokrasi</p>
9	Mendeskripsikan tentang Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial	<p>Mampu menjelaskan secara komprehensif tentang</p> <p>a. Definisi sistem pemerintahan parlementer dan presidensial</p> <p>b. Klasifikasi Sistem pemerintahan</p> <p>c. Kelebihan dan kekurangan</p> <p>d. Parlemenarisme Inggris dan Presidensialisme Amerika</p>	<p>a. Definisi sistem pemerintahan parlementer dan presidensial</p> <p>b. Klasifikasi Sistem pemerintahan</p> <p>c. Kelebihan dan kekurangan</p> <p>d. Parlemenarisme Inggris dan Presidensialisme Amerika</p>

Paket 1

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada pengetahuan tentang pengertian, ruang lingkup dan perkembangan serta kegunaan ilmu politik sebagai pengantar pemahaman mahasiswa sebelum masuk pada bab-bab berikutnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian ilmu politik dari berbagai pakar, ruang lingkup yang dibahas dalam ilmu politik, dinamika perkembangan ilmu politik serta kegunaan ilmu politik bagi sejarah dan kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora. Paket ini merupakan materi awal agar mahasiswa memahami sebelum mahasiswa dikenalkan dengan berbagai dinamika pembahasan sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu politik.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan sebuah ilustrasi tentang pengertian, ruang lingkup dan perkembangan serta kegunaan ilmu politik yang diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan disampaikan oleh dosen.

Dari konsep dan ilustrasi konseptual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang pengertian, ruang lingkup dan perkembangan serta kegunaan ilmu politik.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian ilmu politik
2. Menjelaskan ruang lingkup ilmu politik
3. Menjelaskan perkembangan ilmu politik
4. Mendeskripsikan kegunaan ilmu politik bagi jurusan SKI

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

- a. Pengertian ilmu politik
- b. Ruang lingkup ilmu politik
- c. Perkembangan ilmu politik
- d. Kegunaan ilmu politik bagi jurusan SKI

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikatore dan penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
3. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Memetakan berbagai pengertian ilmu politik dari beberapa pakar ilmu politik
2. Menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu politik, perkembangan ilmu politik serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan SKI
3. Presentasi hasil membaca
4. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau mengkonfirmasi hasil pemahamannya.
5. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 2 tentang konsep-konsep politik
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang pengertian ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik dan perkembangan ilmu politik serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah dan kebudayaan Islam.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang pengertian ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik dan perkembangan ilmu politik sebagai ilmu mandiri serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah dan kebudayaan Islam.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Mahasiswa secara individual dan random. Jelaskan pengertian ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik, perkembangan ilmu politik sebagai ilmu mandiri serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah dan kebudayaan Islam.
2. Perhatikan pengertian, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik yang ada dalam slide di screen.
3. Berikan respon verbal tentang pengertian, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik yang ditampilkan dalam screen.
4. Perhatikan teks tentang pengertian, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik !

Uraian Materi

DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN PERKEMBANGAN SERTA KEGUNAAN ILMU POLITIK

Pengertian Ilmu Politik

Memperbincangkan tentang definisi ilmu politik tentu sangat bergantung pada dinamika perkembangan konteks demografis, geografis serta waktu dimana kehidupan masyarakat mampu berproses secara dinamis dari waktu ke waktu.

Dasar ilmu politik adalah filsafat dari tokoh filsafat dunia asal Yunani, yakni Aristoteles yang menyatakan "zoon politicon" (manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis)¹. Pernyataan Aristoteles tersebut dimaksudkan bahwa setiap individu manusia pasti memiliki potensi butuh adanya peran dan keterlibatan orang lain dalam berbagai kehidupan. Manusia tidak akan mampu hidup dalam keadaan sendirian, dan pasti butuh bantuan manusia lainnya. Dalam kaitan manusia pasti butuh orang lain dan berproses melalui interaksi antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat dan masyarakat inilah, maka dalam perjalanan kehidupan mereka pasti terjadi proses dialektika penguasaan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam kehidupan manusia ada proses pembicaraan, perdebatan serta tindakan yang mengarah pada upaya memperoleh cita-cita yang ideal yang menjadi keinginan bersama, dan itulah hakikat politik.

Ilmu politik hadir sebagai suatu pengetahuan tentang kekuasaan tersebut. Fokus kajian ilmu politik adalah cara mendapatkan kekuasaan, cara menghambat perolehan kekuasaan, cara mempertahankan

¹ Aristotle, *The Politics*, (Bungay, Suffolk, The Chaucer Press), 28.

kekuasaan, cara menggunakan kekuasaan, cara menghambat penggunaan kekuasaan serta cara mendapatkan kembali kekuasaan tersebut.

Banyak tokoh yang mengartikan tentang politik. **Paul Conn** menganggap konflik adalah esensi (hakikat) politik. Sedangkan **Harold Lasswell** merumuskan politik sebagai *who gets what, when and how* (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana).

Hal-hal pokok dan penting yang dipelajari ilmu politik adalah negara, kekuasaan dan perilaku politik. Pokok bahasan kekuasaan adalah *authority* (wewenang), *control* (pengawasan), *capacity* (kemampuan) dan *relationship* (hubungan).

Ilmu politik Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani dengan istilah "polis" yang berarti "negara kota". Sedangkan istilah "politis" berarti "warga negara", dan istilah "politikus" diartikan sebagai kewarganegaraan.

Ditinjau dari beberapa aspek, ilmu politik dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Ilmu politik ditinjau dari aspek kenegaraan adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negaranya dan hubungan antar negara.
- b. Ilmu politik ditinjau dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yakni tentang sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.
- c. Ilmu politik ditinjau dari aspek kelakuan politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijaksanaan.²

² Syarbaini, Syahril, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 4.

Dalam konteks negara, Prof. Miriam Budiardjo mengklasifikasi ada beberapa pengertian ilmu politik, antara lain :

- d. Roger F. Soltau dalam buku *Introduction to Politics* menjelaskan bahwa ilmu politik adalah mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
- e. J. Barents dalam buku *Ilmu Politika* mendefinisikan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat serta mempelajari negara-negara itu melaksanakan tugas-tugasnya.³

Jika inti politik dikaitkan dengan kekuasaan, maka ilmu politik diartikan semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kaitan dengan kekuasaan banyak tokoh pemikir politik yang mendefinisikan, antara lain :

1. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku *Power and Society* menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
2. Deliar Noer dalam buku *Pengantar ke Pemikiran Politik* menjelaskan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.
3. Ossip K. Flechtheim dalam buku *Fundamentals of Political Science* mendefinisikan ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.⁴

³ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 9.

⁴ Ibid, 10-11.

Dalam konteks pembagian (distribution) Harold Laswell merumuskan politik sebagai *who gets what, when and how* (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana).

Sementara dalam konteks pengambilan keputusan, dalam buku *Political analysis and Public Policy*, Joyce Mitchell mendefinisikan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Karl W. Deutsch mengartikan bahwa ilmu politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*politics is the making of decisions by public means*).⁵

Ruang lingkup Ilmu Politik

Miriam Budiardjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik menjelaskan bahwa dalam *contemporary political science* terbitan UNESCO (salah satu lembaga PBB) menjelaskan bahwa ruang lingkup ilmu politik terbagi dalam empat bidang, antara lain :

- a. Teori dan sejarah ide-ide politik
- b. Lembaga-lembaga politik yang terdiri dari adanya konstitusi, pemerintahan nasional (Presiden dan para menteri), pemerintahan regional (Gubernur), pemerintahan lokal (Bupati/Walikota), lembaga-lembaga administrasi publik serta berbagai lembaga yang fokus di sektor sosial ekonomi dan lembaga politik lainnya.
- c. Partai politik, berbagai kelompok, partisipasi warga dalam pemerintahan dan administrasi dan pendapat umum.
- d. Hubungan internasional, politik internasional, organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional.⁶

Perkembangan Ilmu Politik

1. Ilmu Politik Sbg Pra Disiplin Ilmu Yg Mandiri

⁵ Ibid, 11-12

⁶ Ibid, 14.

Sebelum menjadi ilmu yang mandiri, politik hanya sebagai kajian atau pembahasan yang rasional di berbagai tempat dan waktu.

- a) Yunani Kuno (450 SM)
 - Ada buku karya ahli sejarah berjudul Herodotus
 - Plato menulis buku dengan judul “Politic”
 - Aristoteles menulis buku dengan judul “Politica”
- b) India Kuno (+/- 500 SM), yang ditandai dengan adanya buku-buku kesusastraan yang berjudul “*Dharmasastra*” dan “*Arthasastra*”
- c) China Kuno (500 SM) yakni filosof China terkenal bernama Confucius (K’ung Fu Tzu), Mencius (+/- 350 SM), dan mazhab Legalists (antara lain Shang Yang +/- 350 SM).
- d) Indonesia Kuno (Abad 13-15), yang ditandai dengan munculnya karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan yang berjudul “*Negara Kertagama*” (ditulis pada masa Majapahit) dan “*Babat Tanah Jawi*”.
- e) Di negara-negara kawasan Asia, tulisan kesusastraan yang membahas tentang politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme (misi penjajahan).⁷

2. Ilmu Politik Sbg Disiplin Ilmu Yg Mandiri (Abad ke 19)

Pada periode abad ini ilmu politik telah memiliki dasar “ilmu, ruang lingkup dan metodologi yg jelas” dan masuk pada disiplin ilmu. Sebagai contoh di Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis, kajian tentang politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu fokus perhatiannya adalah negara. Kajian tentang negara masuk dalam kurikulum fakultas hukum sebagai mata kuliah ilmu negara (*staatslehre*).

⁷ Ibid, 1-2

Sedangkan di Inggris, kajian politik termasuk dalam kajian filsafat, terutama *moral philosophy* dan bahasannya tidak terlepas dari sejarah. Namun demikian, dengan didirikannya *Ecole Libre des Sciences Politiques* di Paris (1870 M) dan *London School of Economics and Political Sciences* (1895 M) ilmu politik untuk pertama kalinya di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Meski demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat dan sejarah sampai Perang Dunia II masih tetap terasa.

Pada tahun 1858 M seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan kejadian ini di Amerika Serikat dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Selanjutnya pada tahun 1904 M di Amerika Serikat didirikan American Political Science Association (APSA).

Di Belanda pasca Perang Dunia II, pada tahun 1947, juga telah berkembang penelitian tentang negara yang dimonopoli oleh Fakultas Hukum dan kemudian didirikan *Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen* kini namanya menjadi *Faculteit der Sociale Wetenschappen* yang berlokasi di Amsterdam.

Di Indonesia juga berkembang munculnya berbagai fakultas yang serupa seperti di Belanda, yakni di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dibentuk Fakultas Sosial dan Politik, demikian di Universitas Indonesia (UI) Jakarta ada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, dimana ilmu politik menjadi satu departemen/jurusan tersendiri. Namun awal perkembangan ilmu politik di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Pada perkembangan berikutnya, akhirnya di berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia juga melakukan hal yang sama, di UNAIR (FISIP), UNEJ (FISIP), UNHAS (FISIP), FIA (UNBRA), UNESA (FIS) dan PTN/PTS lain di Indonesia

tak terkecuali di UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri ada FISIP yang baru diresmikan pada tahun 2014 kemarin.

Kegunaan Ilmu Politik

Sartono Kartodirjo sebagai tokoh sejarah menjelaskan bahwa ilmu politik sangat berguna untuk menjadi instrumen analisis dalam sejarah. Artinya, sejarah bisa dianalisa melalui pendekatan konsep dan teori. Sedangkan Kuntowidjoyo juga menjelaskan bahwa ilmu politik sebagai instrumen analisis studi sejarah.

Dalam kaitan dengan sejarah, maka ilmu politik diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai dinamika persoalan sosial yang berkembang serta menganalisisnya agar menemukan titik terang dari segala bentuk permasalahan yang terjadi terkait dengan berbagai kebijakan dan kewenangan yang melekat dalam sistem pemerintahan yang berlangsung dalam perkembangan sejarah tersebut.

Demikian juga ketika dalam berbagai dinamika sejarah yang terjadi, maka ilmu politik bisa dijadikan sebagai metode atau pendekatan (approach) dalam memahami beragam fenomena yang berkembang dalam manajemen kelembagaan pemerintahan maupun fungsi-fungsi lembaga tersebut.

Untuk uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam materi-materi paket ini dalam bentuk power point.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan dengan baik dan sistematis tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu politik !
2. Jelaskan dengan sistematis tentang perkembangan ilmu politik dari pra hingga pasca menjadi ilmu mandiri !
3. Jelaskan dengan baik tentang kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah dan kebudayaan Islam di fakultas Adab dan Humaniora.

Paket 2 KONSEP-KONSEP POLITIK

Pendahuluan

Dalam paket 2 ini fokus kajiannya pada berbagai konsep yang berkembang dalam sejarah politik di tingkat dunia, regional dan lokal. Hal ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka memiliki dasar-dasar pokok sebagai pengantar sebelum masuk pada materi inti ilmu politik. Pembahasan dalam paket ini mencakup konsep-konsep politik yang berkembang dalam berbagai dinamika kehidupan politik di berbagai negara di dunia.

Paket 2 ini mencakup konsep-konsep pokok ilmu politik antara lain manusia sebagai makhluk individu dan sosial, bangsa dan negara, negara dan kekuasaan politik serta fungsi dan tujuan negara. Cakupan materi dalam paket ini merupakan materi awal agar mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang politik riil yang berkembang di berbagai negara di dunia secara umum.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi sebuah ilustrasi gambar tentang konsep-konsep politik yang diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsepsi dan disampaikan oleh dosen.

Dari konsep dan ilustrasi konseptual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang berbagai konsep yang berkembang dalam ilmu politik, baik menyangkut negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian dan alokasi.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial
2. Menjelaskan bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik)
3. Menjelaskan negara dan kekuasaan politik
4. Menjelaskan fungsi dan tujuan negara

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

- a. Konsep dasar manusia sebagai individu dan sosial
- b. Bangsa dan negara
- c. Negara dan kekuasaan politik
- d. Fungsi dan tujuan negara.

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang konsep politik
3. Menjelaskan konsep-konsep politik
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Menjelaskan konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial
2. Menjelaskan bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik)
3. Menjelaskan negara dan kekuasaan politik
4. Presentasi hasil membaca
5. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau mengkonfirmasi hasil pemahamannya.
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 3 tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang konsep-konsep politik yang berkembang.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial, bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik), negara dan kekuasaan politik serta memahami tentang fungsi dan tujuan Negara.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa secara individual dan random untuk menjelaskan tentang konsep-konsep politik
2. Perhatikan pengertian konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial, bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik), negara dan kekuasaan politik serta memahami tentang fungsi dan tujuan Negara.
3. Berikan respon verbal tentang konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial, bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik), negara dan kekuasaan politik serta memahami tentang fungsi dan tujuan Negara.

Uraian Materi

KONSEP-KONSEP POLITIK

Konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan potensi yang hanief dan dibekali keyakinan akan kekhalifahannya di bumi ini. Potensi dan bekal ini manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan terhadap diri dan orang lain. Manusia diciptakan pertama kali adalah Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istri Adam, dan memiliki keturunan Qabil dan Habil, Ikrimah. Dari proses biologis, kemudian berkembang dan terus berkembang serta menyebar ke berbagai tempat dan wilayah di seluruh dunia hingga saat ini.

Dalam berbagai dinamika perkembangan manusia, tentu individu satu dengan individu yang lainnya memiliki kebutuhan dan kepentingan serta ketergantungan. Dari pola hubungan inilah lahir pola interaksi dan interrelasi antar individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan individu. Proses interaksi dan interrelasi ini berdampak pada konsekuensi logis menjadi ikatan saling kenal, saling butuh, saling bergantung, saling menghormati, saling toleran dan saling menjaga komitmen hubungan tersebut. Fenomena inilah sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat Al-Hujuraat (49 : 13) seperti berikut :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya ; Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS 49 :13)

Pada ayat yang berkategori makkiyah (ayat yang turun saat nabi ada di Makkah) diatas, Allah SWT telah dengan gamblang menjelaskan bahwa secara sosiologis, masyarakat Makkah yang masih dalam kondisi jahiliyah (sangat terbelakang/primitif) tersebut perlu menyadari, memahami dan mengakui eksistensinya sebagai manusia yang harus "ta'aruf" (saling kenal-mengenal). Dengan saling kenal-mengenal, maka konsekuensi logisnya berdampak pada saling kenal, saling butuh, saling bergantung, saling menghormati, saling toleran dan saling menjaga komitmen antar masing-masing, baik antar individu maupun antar kelompok.

Dalam kaitan hubungan antar individu dan antar kelompok tersebut, maka akan tercermin akan adanya konsep manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara individu, manusia harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban yang melekat serta tanggung jawab terhadap dirinya. Demikian pula secara sosial, manusia harus menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban yang melekat serta tanggung jawab yang harus diberikan kepada orang lain dan atau kelompok lain di luar dirinya.

Dengan menyadari akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki, maka manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus berproses diri dengan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, belajar dari pengalaman orang lain, belajar menerima dari berbagai kenyataan yang dia hadapi dan belajar mengenali hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari orang lain yang *ending*-nya akan melahirkan kemandirian pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dari individu manusia tersebut.

Secara kodrati, setiap individu manusia pasti memiliki kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan dan papan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, dia harus berhubungan dengan orang lain, baik dengan cara meminta, proses jual-beli ataupun dengan cara lain. Ilustrasi yang sama ketika fenomena di kampus, dimana mahasiswa yang ingin menjadi ketua organisasi (KOSMA, DEMA, SEMA, HMI, PMII, IMM dan KAMMI), tentu dia harus berupaya keras untuk mempengaruhi mahasiswa yang lain untuk mendukung dan memilih dia sebagai ketua, baik dengan cara sosialisasi visi dan misi, kampanye, lobbying maupun dengan bentuk kontrak program, yang *ending*-nya dapat menarik simpati dan empati mahasiswa yang lain untuk mensupport dan memutuskan dia sebagai ketua yang terpilih. Berbagai ilustrasi diatas menunjukkan manusia sebagai makhluk individu maupun sosial.

Kegiatan pengaruh-mempengaruhi antar individu dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut, mengindikasikan adanya potensi bahwa "manusia adalah makhluk yang bermasyarakat" atau menurut filosof Yunani Aristoteles (yang hidup pada tahun 384-322 SM) diistilahkan sebagai "*zoon politicon*".

Hubungan kerjasama antara manusia dalam masyarakat bisa diketahui melalui awal mula manusia bekerja sama dalam masyarakat lingkungan bangsanya, kemudian bekerja sama dalam lingkungan masyarakat dunia. Menurut Dr. P. Endt, dalam bukunya "*Sociologie*", bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama, terikat oleh kepentingan bersama dan mereka saling mempengaruhi batinnya. Jika tidak dapat terdapat pengaruh satu sama lain, walau apapun bentuknya, maka kumpulan itu belum disebut masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai keseluruhan hubungan-hubungan antar manusia yang ditata. Dalam kehidupan berkelompok, dalam hubungannya dengan manusia yang lain, manusia menginginkan suatu nilai (*value*) yaitu kekuasaan (*power*), kekayaan (*wealth*), penghormatan (*respect*), kesehatan (*well-being*), kejujuran (*rectitude*), keterampilan (*skill*), pendidikan (*enlightenment*), dan kasih sayang (*affection*).⁸

BANGSA DAN NEGARA

Pengertian Bangsa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "bangsa" diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri.

Sedangkan Syahril Syarbaini dalam buku Pengetahuan Dasar Ilmu Politik mengklasifikasi istilah "bangsa" sesuai dengan pengertian para ahli kenegaraan yang dikategorikan sebagai berikut :

a. Bangsa Dalam Arti Etnis

Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh.

⁸ Syarbaini, Syahril. dkk. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 18.

b. Bangsa Dalam Arti Kultural

Bangsa dalam arti kultural merupakan sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas kebudayaan yang sama, seperti adat-istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya lainnya.

c. Bangsa Dalam Arti Politis

Bangsa dalam arti politik merupakan kelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam satu organisasi kekuasaan dalam negara, seperti menggunakan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kebangsaannya.⁹

Ada beberapa tokoh dunia yang mendefinisikan “bangsa” sesuai dinamika kehidupan sosial yang berkembang, antara lain :

1. *Ernest Renan*, menyatakan bahwa bangsa terbentuk atas dasar solidaritas. Solidaritas antar sesama manusia terbangun, karena mereka memiliki pengalaman dan pengorbanan yang sama di masa lalu dan kini, serta kehendak untuk melakukan hal sama di masa depan.
2. *Otto Bauer*, menyatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena persamaan nasib.
3. *Friederich Ratzel*, menyatakan bahwa bangsa adalah adanya hasrat bersatu karena kesamaan tempat tinggalnya (bangsa secara geopolitik).
4. *Hans Kohn* berpendapat bahwa bangsa merupakan buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku.
5. *Jalobsen dan Lipman*, menjelaskan bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan politik. Unsur-unsur pembentuk bangsa: sekelompok manusia yang ingin bersatu mencapai tujuan dan cita-cita, berada dalam suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, senasib dan sepenanggungan, terdapat kesamaan seperti karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang dan sampai pada tahap pematangannya, maka para pendiri mewakili masyarakat dalam suatu bangsa memunculkan inisiatif lahirnya suatu negara. Hampir setiap negara mengalami hal sama dalam pendirian negara yang berawal dari dinamika kemasyarakatan yang berkembang pada proses dan dinamika kebangsaan yang kemudian melahirkan sebuah negara baru dan berdaulat.

Proses dan dinamika yang berkembang dan melahirkan sebuah negara tersebut tentu sebagai akibat dari adanya kesamaan identitas yang mampu mempersatukan tekad dan semangat yang berakar dari ras, suku, agama, bahasa, geografis. Sebagai contoh, Indonesia secara geografis ada di kawasan Asia Tenggara, masyarakatnya memiliki habitat yang plural (majemuk) dalam konteks kesukuan (etnis), keturunan (ras), agama dan bahasa, merupakan contoh nyata sebagai negara yang dipersatukan oleh berbagai kesamaan tersebut. Secara *defacto* Indonesia terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lebih dikenal sebutan “Sumpah Pemuda”, dimana ada satu tekad dan semangat kuat yang dimiliki seluruh bangsa untuk mendirikan negara. Tekad tersebut tertuang dalam simbolisasi kesatuan yakni “Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia”.

Kesatuan tekad dan semangat dalam suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan interaksi serta interrelasi antar komponen bangsa yang ada hingga terciptanya proses dan

⁹ Ibid, 18

dinamika perubahan dari waktu ke waktu untuk menyatukan visi dan misi serta strategi menuju tercapainya cita ideal menjadi sebuah negara yang berdaulat dan mandiri tanpa adanya intervensi dan tekanan asing. Setiap bangsa dalam suatu negara pasti memiliki pandangan hidup sebagai wujud cita ideal yang akan dituju dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini.

Sebagai ilustrasi, Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun melalui proses panjang dengan Pancasila sebagai konsensus kolektif sekaligus puncak ideologi kebangsaan terbaik dan teruji oleh waktu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (*mind-set*), pola sikap (*affection*) dan pola tindakan (*behavior*) dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), wilayah, bahasa dan adat istiadat. Walhasil, Pancasila adalah pandangan hidup sekaligus cita ideal seluruh komponen bangsa Indonesia menuju terciptanya masyarakat madani (masyarakat yang berkeadaban).

Suatu bangsa akan menjadi sebuah negara jika melalui adanya rasa kebangsaan yang kuat, sehingga kerap kali negara yang berdiri tersebut dikenal dengan istilah “negara kebangsaan”. Jadi bangsa adalah suatu masyarakat yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, tumbuh berkembang dalam sejarah yang sama, memiliki identitas dan adat-istiadat yang sama, semua individu merasa menjadi bagian dari sistem hidupnya, dan memiliki cita-cita hidup yang sama. Sedangkan negara adalah masyarakat yang bersatu, berdaulat dan menetap dalam wilayah tertentu dengan visi, misi dan strategi yang sistematis, rasional dan terukur, yang dijalankan oleh berbagai struktur dan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan menjadikan rakyat sebagai objek fokus pelayanan dalam berbagai kebutuhan hidupnya.

Friederich Hertz (Jerman) menyatakan ada empat unsur terbentuknya suatu bangsa, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan dan komunikasi.
- b. Adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional sepenuhnya dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
- c. Adanya keinginan dalam menunjukkan ciri khas sendiri melalui kemandirian, keaslian, keunggulan, bahasa dan lain-lain.
- d. Adanya keinginan yang menunjukkan keunggulan dalam pergaulan antara bangsa-bangsa.¹⁰

Integrasi Politik

Integrasi politik menurut Ramlan Surbakti meliputi lima jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan massa serta perilaku integratif. Proses penyatuan kelima integrasi politik tersebut juga disebut dengan pembangunan politik.

¹⁰ Ibid, 20

- a. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.
- b. Integrasi wilayah adalah pembentukan kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil, yang terdiri atas satu atau dua kelompok budaya serta sarananya, yakni konsep wilayah yang jelas dan aparat kekuasaan untuk menjaganya.
- c. Integrasi nilai adalah persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar politik dan prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama dapat dilakukan dengan menciptakan sistem nilai (ideologi nasional).
- d. Integrasi elit dan massa adalah upaya untuk menghubungkan antara golongan elit yang memerintah dan massa yang diperintah, juga menyangkut pola hubungan kewenangan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Perilaku integratif adalah kesediaan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi besar (negara) dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.¹¹

R. Willian Liddle menyatakan bahwa integrasi nasional yang tangguh akan tercapai jika terjalin konsensus pada dua hal, yakni antara masyarakat dengan sistem politik, yaitu bagaimana kehidupan bersama sebagai suatu bangsa diselenggarakan, sedangkan Nazaruddin Syamsuddin menyatakan bahwa kebijaksanaan nasional akan mempengaruhi proses integrasi nasional. Di sini, peranan pemerintah sangat penting dalam mendorong terwujudnya persatuan masyarakat dalam skala nasional. sebuah kebijaksanaan pemerintah yang didukung oleh semangat yang tinggi untuk menjalankannya, sangat berpengaruh bagi perjalanan kehidupan bangsa.¹²

NEGARA DAN KEKUASAAN POLITIK

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Tokoh-tokoh yang menekankan negara sebagai inti dari politik antara lain :

- a. **Roger F.Soltau** menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
- b. **J. Barents** menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ; ilmu politik mempelajari negara-negara melakukan tugasnya.¹³

KEKUASAAN

Kekuasaan adalah “kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku”. Tokoh-tokoh yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Contoh (serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan kaum militer, dll).

¹¹ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 51-55.

¹² Syarbaini, Syahril, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 21.

¹³ Budiarmo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 10

- Harold D. Laswell dan A. Kaplan mendefinisikan ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
- W.A. Robson menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.
- Daliar Noer menjelaskan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.
- Ossip K. Flechtheim menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.¹⁴

FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA

1. Fungsi Negara

Fungsi negara secara umum adalah peranan dan kedudukan negara, serta aktifitas negara dalam upaya mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan semula. Fungsi-fungsi negara secara umum dapat mencakup dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Fungsi negara sebagai kepemilikan;
- b. Fungsi negara sebagai pembangun, yang melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
- c. Fungsi negara sebagai pengatur ketertiban (*law and order*);
- d. Fungsi Negara sebagai pertahanan/agresi militer;
- e. Fungsi negara sebagai pemeliharaan infrastruktur komunikasi dan menegakkan keadilan.

Fungsi negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan negara. Tujuan negara merupakan suatu cita yang akan dicapai oleh suatu negara, sedangkan fungsi negara adalah usaha-usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara tersebut. Fungsi negara terlihat dalam bagaimana corak dan gaya suatu negara dalam upaya mencapai cita-citanya. Dalam hal ini, peranan ideologi negara sangat menentukan, ideologi suatu negara akan terlihat dan dirasakan dalam segala aktifitas negara atau pemerintah dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan negara. Negara atau pemerintah secara kongkret memiliki fungsi mengarahkan dan mengantarkan negara pada tujuannya yang sudah ditetapkan.

Menurut Charles E. Meriam, ada lima fungsi negara, yakni fungsi keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. Sedangkan Moh. Kurnadi menjelaskan ada dua fungsi negara, yakni :

- a. Melaksanakan ketertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik-konflik dalam masyarakat.
- b. Memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan ekonomi.¹⁵

2. Tujuan Negara

Tujuan negara adalah sesuatu yang hendak diwujudkan oleh negara yang bersangkutan dengan menggunakan organisasi pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan. Dengan mengetahui tujuan suatu negara dapat dikaji melalui hakikat kekuasaan negara tersebut. Sepanjang sejarah telah menarik perhatian para pemikir dan negarawan untuk mengemukakan berbagai teori tentang tujuan negara,

¹⁴ Ibid,10.

¹⁵ Ibid, 34.

teori tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan dari suatu masyarakat yang turut mempengaruhi alam pikiran dari para pemikir tentang negara dimaksud.

Ada beberapa tokoh yang dapat menjelaskan tentang tujuan-tujuan negara, antara lain :

- a. Roger H. Soltau menjelaskan bahwa tujuan negara mengusahakan rakyat berkembang serta mengembangkan data ciptanya sebebass mungkin.
- b. Harold J. Laski menjelaskan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginannya secara maksimal.¹⁶

Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik. Konsep-konsep tersebut, antara lain sumber kekuasaan dan perbedaan antara kekuasaan dengan kewenangan.

1. *Power* (Kekuasaan)

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan, yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.

Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling banyak dibahas, bahkan kekuasaan dianggap identik dengan politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam *Power and Society* menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

2. *Authority* (Kewenangan)

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektifitas organisasi.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya *an analysis of social power*, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapakan kepatuhan terhadap peraturannya.

3. *Influence* (Pengaruh)

Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan, yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih

¹⁶ Ibid, 35.

unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering berhasil.

3. *Persuasion* (Ajakan)

Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan tidak mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu. Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain.

5. *Coercion* (Paksaan)

Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi suatu keputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemilik kekuasaan.

Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu mempengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.

Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak ini memaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.

6. *Acquiescence* (Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan satu hal. Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. *Acquiescence* diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.

Sumber-sumber Kekuasaan

Seorang yang memiliki sesuatu, tentu mempunyai sumber darimana ia mendapatkan sesuatu tersebut. Demikian halnya dengan kekuasaan. Kekuasaan datang dari berbagai sumber, diantaranya kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Seorang atasan dapat memerintahkan bawahannya agar melakukan sesuatu. Jika bawahan melanggar perintah atasan, maka bawahan bisa dikenai sanksi.

Seseorang yang memiliki kekayaan dapat memiliki kekuasaan. Misalnya seorang konglomerat dapat menguasai suatu pihak yang didanainya. Kepercayaan atau agama juga merupakan sumber kekuasaan. Misalnya di Indonesia, alim ulama banyak dituruti dan dipatuhi masyarakat. Alim ulama bertindak sebagai pemimpin informal umat, maka ia perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan di tempat umatnya.

Jack H. Nagel dalam bukunya *The Descriptive Analysis of Power* yang juga terdapat dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, perlu dibedakan antara *scope of power* dan *domain of power* (wilayah kekuasaan). Cakupan kekuasaan (*scope of power*) menunjuk kepada perilaku, serta sikap dan keputusan yang menjadi subyek dari kekuasaan. Misalnya, seorang direktur bisa memecat seorang karyawan, tetapi direktur tersebut tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap karyawan diluar hubungan pekerjaan.

Wilayah kekuasaan (*domain of power*) menjelaskan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku organisasi, atau kolektivitas yang kena kekuasaan. Misalnya seorang direktur memiliki kekuasaan di perusahaannya, baik itu di pusat ataupun di cabang-cabangnya.

Dalam suatu hubungan kekuasaan (*power relationship*) selalu ada pihak yang lebih kuat daripada pihak lain. Hal ini menyebabkan hubungan tidak seimbang(asimetris), dan ketergantungan satu pihak dengan pihak lain. Semakin timpang hubungan ini, maka makin kuat ketergantungannya. Hal ini disebut hegemoni, dominasi, atau penundukan oleh pemikir abad 20.

Perbedaan *Power* (Kekuasaan) dan *Authority* (Kewenangan)

Dalam pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa kewenangan berhubungan dengan kekuasaan, tapi dari segi lain, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya, kewenangan adalah kekuasaan secara formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar formalitas. Kewenangan adalah salah satu cara bagi seseorang untuk memperkuat kekuasaannya. Kewenangan adalah kekuasaan namun kekuasaan tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik di rumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan hak berkuasa yang di tetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang di perlukan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang paling banyak dibahas dalam ilmu politik, selain konsep lainnya. Kekuasaan berasal dari beberapa sumber, misalnya kekayaan, kedudukan, dan kepercayaan. Kekuasaan dan kewenangan adalah konsep yang berhubungan, tetapi keduanya berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar formalitas.

Untuk uraian sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan keinginan dan kemauan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial !
2. Mengapa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?
3. Apa yang dimaksud dengan negara dan kekuasaan?
4. Jelaskan tujuan dan fungsi negara?

Paket 3

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN

Pendahuluan

Dalam paket 3 ini fokus kajiannya pada hubungan antara ilmu politik dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka mampu mengaitkan hubungan antara ilmu politik dengan berbagai dunia ilmu pengetahuan lain. Pembahasan dalam paket ini mencakup keterkaitan antara ilmu politik dengan sejarah, filsafat, sosiologi, ekonomi, psikologi, ilmu bumi dan ilmu hukum.

Cakupan materi dalam paket 3 ini merupakan materi pokok yang harus diketahui oleh mahasiswa agar mampu menguasai interelasi atau hubungan yang paling pokok antara ilmu politik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lain yang semuanya saling terkait dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi dan yang bisa juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar tentang keterkaitan antara berbagai komponen keilmuan yang semuanya diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan disampaikan oleh dosen.

Dengan pemaparan materi dan ilustrasi gambar ini, diharapkan mahasiswa mampu menyerap materi dengan baik sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan berbagai diskusi, dialog dan tanya jawab yang mengalir ke pola simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media, LCD, proyektor dan screen dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang keterkaitan ilmu politik dengan beragam ilmu pengetahuan secara komprehensif.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan keterkaitan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan yang lain
2. Menjelaskan perbedaan dan persamaan masing-masing

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

- a. Sejarah
- b. Filsafat
- c. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial
- d. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi
- e. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi
- f. Hubungan ilmu politik dengan antropologi
- g. Hubungan ilmu politik dengan geografi
- h. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang apa hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya
3. Menjelaskan keterkaitan antara ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Menjelaskan keterkaitan sejarah politik
2. Menjelaskan keterkaitan filsafat dan politik
3. Menjelaskan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial, psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.
4. Presentasi hasil membaca
5. Penggunaan pola tanya jawab (dialogis) dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau mengkonfirmasi hasil pemahamannya.
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 4 tentang kekuasaan politik.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan yang lain.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang keterkaitan atau relasi antara ilmu politik dengan sejarah, ilmu sosial, psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa secara individual dan random untuk menjelaskan tentang keterkaitan ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain
2. Perhatikan sejarah, filsafat, hubungan ilmu politik antara ilmu politik dengan sejarah, ilmu sosial, psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.
3. Berikan respon verbal tentang keterkaitan atau relasi antara ilmu politik dengan sejarah, ilmu sosial, psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.

Uraian Materi

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN YANG LAIN

Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan Lain Sejarah

Dalam sejarah perkembangan dan dinamika kehidupan manusia, ilmu politik sangat erat dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan instrumen, sarana atau alat yang paling penting bagi ilmu politik. Sejarah adalah penyumbang bahan berupa data dan fakta dari masa lampau, untuk kemudian diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan para ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lalu dan inilah yang menjadi tujuannya. Sedangkan sarjana ilmu politik biasanya untuk menemukan proyeksi ke depan. Melalui sejarah, ilmu politik mampu menemukan pola tingkah laku politik yang memungkinkan untuk pola masa depan (*future oriented*). Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, terutama sejarah kontemporer, oleh sarjana ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan (*recurrent patterns*) yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (*patterns of political behavior*) yang memungkinkan untuk dalam batas-batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberikan gambaran bagaimana suatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, mempelajari ilmu politik harus juga mempelajari sejarah dan dinamika politik yang berkembang dari waktu ke waktu, baik kehidupan politik pra-kemerdekaan, dinamika politik internasional saat Indonesia berjuang kemerdekaan (fenomena pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI, Panitia Sembilan hingga lahirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI). Demikian pula dinamika politik pada masa orde lama (1945-1966), orde baru (1966-1998) serta orde reformasi (1998-sekarang). Dinamika perpolitikan dari masa ke masa penuh dengan fenomena yang menarik untuk dibahas dan dikaji dengan nalar politik. Belajar ilmu politik di Indonesia suatu keharusan untuk mengetahui sejarah dan dinamika politik di Indonesia.

Filsafat

Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis untuk mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (*universe*) dan kehidupan manusia. Ilmu politik sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Dalam pandangan filosof Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral atau etika. Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan etika tercermin dalam karangan filosof Yunani Plato, *politeia*, yang menggambarkan negara yang ideal. Di negara-negara Barat pemikiran politik baru memisahkan diri dari etika pada abad ke-16 dengan dipelopori oleh negarawan Italia Niccolò Machiavelli.¹⁷ Akan tetapi di dunia Barat akhir-akhir ini kembali timbul perhatian baru tentang filsafat dengan munculnya buku *a Theory of Justice*, karangan John Rawls tahun 1971. Rawls memperjuangkan distribusi kekayaan secara adil (*equity*) bagi pihak yang kurang mampu.

¹⁷ Budiarto, Miriam, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 18-19

Hubungan ilmu politik dengan filsafat, kalau filsafat adalah usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan masalah yang menyangkut kehidupan manusia, bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, seperti nilai, hakikat, asal, dan nilai dari suatu negara.¹⁸ Sebagai ilustrasi, apa yang disebut negara, apa tujuannya, bagaimana sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*). Ilustrasi tadi mengindikasikan hubungan ilmu politik dengan filsafat.

Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu-ilmu Sosial Lain

Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan komponen ilmu sosial yang lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu geografi. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama yaitu manusia sebagai anggota kelompok (*group*). Mereka satu dengan yang lain harus saling mengenal, saling butuh, saling bergantung, saling mempelajari perilaku kehidupan individu dan kelompok dan bagaimana cara bekerjasama dalam kehidupannya. Cara pandang ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Sejak kira-kira tahun 400 S.M filsuf Yunani Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* (makhluk sosial atau makhluk politik) dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang.

UNESCO sebagai salah satu badan sosial internasional dari persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengakui bahwa ilmu-ilmu sosial antara lain sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi, statistik, kriminologi, demografi, dan ilmu administrasi.

Sosiologi

Sosiologi memiliki sifat umum daripada ilmu yang lain. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usaha memahami latar belakang, stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, tindakan sosial, fakta sosial dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dalam masyarakat apabila muncul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang memajukan kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan politik. Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi (kalau melihat manusia) maupun sebagai sistem pengendalian (*system of control*).

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk beluk yang berhubungan dengan sosial. Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi dimana berkaitan dengan kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan organisasi politik, dari keseluruhan yang tersebut adalah pernyataan naluri dari khalayak sosial. Alhasil, bisa disimpulkan bahwa masyarakat adalah lebih dahulu atau ada muncul daripada negara.

Sosiologi adalah ilmu yang terkait kuat secara keseluruhan akan proses perkembangan kehidupan manusia, dimana jangkauan ilmu sosiologi lebih luas daripada ilmu politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan fenomena ilmu politik. Sedangkan jangkauan ilmu politik

¹⁸ Syarbaini, Syahril, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 8

bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan berperilaku politik, etika berpolitik, dan hal praktis yang berkaitan dengan kekuasaan politik.

Antropologi

Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi menunjukkan betapa rumit dan sulitnya membina kehidupan yang bercorak nasional dari komunitas yang tradisional. Betapa kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lainnya mempunyai daya tahan yang kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional tersebut. Betapa dalam beberapa situasi faktor-faktor sosial budaya tersebut bahkan menjadi lebih kuat dan lebih sadar melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha *nation building*, apalagi jika ciri-ciri serta sifat-sifatnya tidak lebih dahulu diperhitungkan dengan seksama.

Bagi seorang sarjana ilmu politik, kesadaran akan kenyataan ini memungkinkannya untuk melaksanakan beberapa penelitian khusus seperti : besar kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama serta sistem kehidupan sosialnya (seperti faktor-faktor perasaan ikatan primordial dalam kehidupan politik Indonesia) sampai dimana pengertian dan kesadaran berbangsa terdesak atau dibatasi oleh pola-pola kesetiaan suku dan kebudayaan setempat, pengaruh komposisi golongan penduduk di suatu daerah atau kota tertentu terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat, sifat serta ciri-ciri khusus apa yang dimiliki suatu suku bangsa tertentu yang memudahkannya untuk mengubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan modern.¹⁹

Indonesia adalah salah satu Negara yang paling plural di seluruh dunia. Pluralitas ini diindikasikan oleh adanya ratusan suku bangsa, ratusan bahasa dan dipisahkan oleh 17.866 lebih pulau besar dan kecil, dan ini merupakan aset terbesar Negara Indonesia. Masing-masing suku bangsa tentu saja memiliki asal-usul yang saling memperkaya khazanah budaya lokal Indonesia. Ratusan suku dan ratusan bahasa yang sama-sama memiliki kekhasan tersebut justru bisa dibangun dengan rasa saling butuh rasa persatuan dan kesatuan yang disimbolkan dengan adanya sumpah pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan hingga kini masih tetap digelorakan dengan semangat satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Alhasil, ilmu politik dan antropologi masing-masing saling terkait. Ilmu politik disimbolkan oleh kekuasaan Negara yang mengatur seluruh kehidupan manusia, sedangkan antropologi mengkaji tentang kebudayaan yang lahir dari berbagai kehidupan manusia tersebut.

Ilmu Ekonomi

Sejak awal, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan istilah ekonomi politik (*political economics*), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi Negara-negara pesaingnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan ke-19. Mengingat ilmu pengetahuan semakin lama semakin berkembang, maka menurut Budiarto, kedua ilmu tersebut akhirnya memisahkan diri menjadi dua lapangan ilmu yang mengkhususkan perhatian pada tingkah laku manusia yang berbeda-beda. Ilmu politik (*political science*) dan ilmu ekonomi

¹⁹ Ibid. 22

(*economics*).²⁰ Dalam perkembangannya, menurut Syahril Syarbaini, ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci.²¹

Pemikiran yang bertolak dari faktor kelangkaan (*scarcity*) menyebabkan ilmu ekonomi berkonsentrasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu ilmu ekonomi juga dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan negara. Sedangkan kini pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan sebagai ilmu yang bersifat independen dan terpisah dari kajian politik, dimana kajian ekonomi ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana caranya, dimana tempat peluangnya, apa dan bagaimana mengelola dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya di beberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya bagi pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasalahan yang memang lazim timbul didalam bernegara.

Di berbagai negara atau pemerintahan di dunia pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Makin maju suatu negara, berarti pertumbuhan ekonominya mengalami produktifitas. Makin teratur laju perekonomian suatu negara, maka makin besar pula peluang partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian mereka, dan ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang lebih baik. Alhasil, ilmu politik dan ilmu ekonomi memiliki korelasi positif bagi produktifitas dan kesejahteraan rakyat.

Psikologi Sosial

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tindak-tanduk dan aktifitas masyarakat banyak dipengaruhi oleh akal budi individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Menurut Miriam Budiarmo, jika sosiologi mengkaji tentang kegiatan kehidupan sosial dan psikologi umum memusatkan perhatian pada kehidupan orang-perorang, maka psikologi sosial berusaha untuk menyusun kerangka dan analisa yang dapat menghubungkan kedua tingkat tersebut. Kegunaan psikologi sosial dalam analisa ilmu politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisa sosial-politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisa yang bersifat mikro.²²

Jika tindak-tanduk politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas. Para pakar politik sampai saat itu juga mencoba untuk mempelajari tindak-tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi.

Psikologi sosial adalah pengkhususan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa, dan gerakan massa) maupun dari segi intern kesehatan fisik perorangan,

²⁰ Ibid, 23

²¹ Ibid, 9

²² Ibid, 24

semangat dan emosi. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana tokoh kharismatik turut serta menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik atau kenegaraan.

Geografi

Menurut Budiarjo, ada beberapa faktor geografis yang sangat mempengaruhi ilmu politik, antara lain perbatasan strategis (*strategic frontiers*), desakan penduduk (*population pressures*), daerah pengaruh (*sphere of influence*). Montesquieu, sarjana asal Perancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor ilmu bumi mempengaruhi politik suatu Negara.²³

ilmu politik juga sangat berhubungan dengan ilmu geografi. Fenomena ini digambarkan dalam kerjasama bilateral dan multilateral yang menjadi representasi pengelompokan suatu wilayah, area atau zona yang berkonsentrasi pada aktifitas di bidang politik. Pada masa sebelum perang dunia II, cabang geografi mendapat perhatian besar, sehingga muncul istilah geopolitik atau *geopolitics*, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen (1864-1933). Ia menganggap bahwa disamping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik dalam negeri.

Ilmu hukum

Ilmu hukum sejak dahulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik. Ilmu hukum mengkaji tentang bagaimana mengatur dan memaksakan undang-undang (*law enforcement*), dan fungsi ini merupakan salah satu kewajiban negara yang paling mendasar. Ilmu hukum yang fokus mengkaji tentang negara adalah ilmu hukum tata negara (*public law*) dan ilmu negara (*general theory of state*). Analisis mengenai ilmu hukum mulai dikembangkan pada abad ke-19, ilmu hukum memiliki sifat yang normatif dan mencoba selalu mencari unsur keadilan. Hans Kelsen menganggap negara sebagai suatu badan hukum atau *rechtspersson* (*juristic person*) seperti misalnya suatu persoalan terbatas (PT). Dalam defenisi Hans Kelsen suatu badan hukum adalah sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai suatu pribadi (*persoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban. Semisal suatu badan hukum boleh memiliki, menjual dan atau membeli rumah, boleh menghadapkan pihak lain ke muka hakim dan pada gilirannya dia dapat dihadapkan ke muka hakim oleh pihak yang lain. Perbedaan negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan.²⁴

Perbedaan ilmu politik dan ilmu negara dalam buku *encyclopedia of the social sciens* yang dirangkum oleh Hermann Heller yaitu :

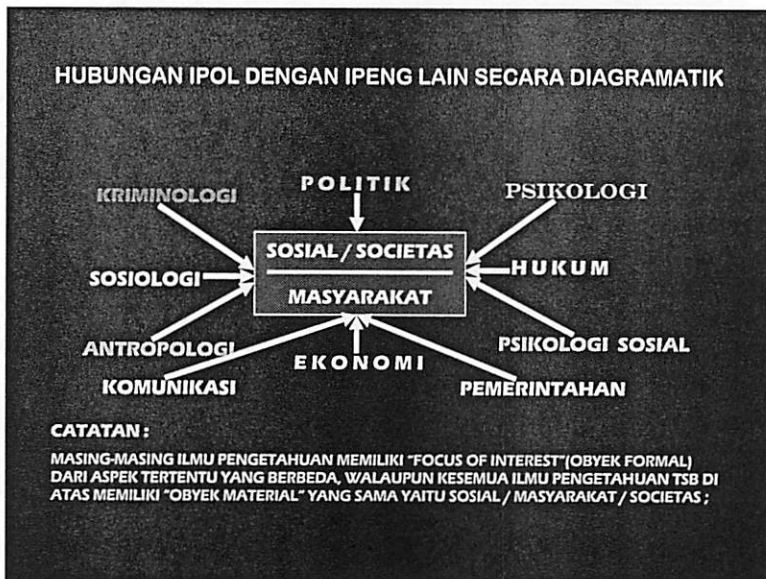
1. Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan yang praktis, yang ingin membahas keadaan sesuai dengan kenyataan, sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan yang teoritis yang sangat mementingkan segi normatif, berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Menurut Hermann Heller, perbedaan ini hanya perbedaan tekanan sebab ilmu politik tidak dapat menjauhkan diri dari teori, tetapi juga memperhatikan segi normatif sekali pun tidak sedalam ilmu negara.

²³ Ibid, 25.

²⁴ Ibid, 27.

2. Ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan subyek ilmu politik ialah gerakan dan kekuasaan di belakang evolusi yang terus-menerus.
3. Ilmu negara dianggap lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih kongkret dan lebih mendekati realitas.
4. Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi telah tertarik pada ilmu politik.

Untuk uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam bentuk power point



2. FUNGSI-FUNGSI ILMU SOSIAL LAIN TERHADAP ILMU POLITIK

- a. ILMU - ILMU SOSIAL LAIN YANG DIPERLUKAN BAGI ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PEMBANTU, DAPAT KITA GOLONGKAN MENJADI TIGA KATEGORI, YAITU:
- 1) ILMU LAIN YANG SANGAT DIPERLUKAN BANTUANNYA (BERSIFAT MUTLAK);
 - 2) ILMU LAIN YANG BERSIFAT MEMBANTU (BERSIFAT TIDAK MUTLAK);
 - 3) ILMU LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PENYELIDIKAN (*TOOL OF ANALYSIS*);
- b. ILMU LAIN YANG SANGAT DIPERLUKAN BANTUANNYA (BERSIFAT MUTLAK) :
- 1) ILMU EKONOMI ;
 - 2) ILMU HUKUM ;
 - 3) ILMU SEJARAH ;
 - 4) ILMU SOSIOLOGI ;
- c. ILMU LAIN YANG BERSIFAT MEMBANTU (BERSIFAT TIDAK MUTLAK) :
- 1) PSIKOLOGI SOSIAL ;
 - 2) ANTROPOLOGI SOSIAL ;
 - 3) ILMU BUMI (GEOGRAFI) ;
- d. ILMU LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PENYELIDIKAN (*TOOL OF ANALYSIS*) :
- 1) STATISTIK ;
 - 2) FILSAFAT

PERBANDINGAN : ILMU POLITIK DAN ILMU EKSAKTA

- ❖ ILMU POLITIK OBYEK MATERIALNYA ADALAH MASYARAKAT (SOCIETAS) YAITU HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA, SEHINGGA EKSISTENSI ILMU POLITIK BERSIFAT DINAMIS ;
- ❖ BILA DIBANDINGKAN DENGAN ILMU EKSAKTA, MEMPELAJARI ILMU POLITIK LEBIH SULIT KARENA :
 1. MASALAH PERISTILAHAN (TERMINOLOGI) :
 - ❖ BELUM TERDAPAT TERMINOLOGI YANG TEPAT DALAM ILMU POLITIK UNTUK SUATU PENGERTIAN YANG SAMA ;CONTOH :
 - ❖ TERMINOLOGI "DEMOKRASI" BISA PUNYA PENGERTIAN BERMACAM-MACAM ;
 - ❖ DEMIKIAN PULA UNTUK ISTILAH / TERMINOLOGI BIROKRASI, PERBANDINGAN POLITIK, HUBUNGAN INTERNASIONAL, DLL ;
 2. TIPIKAL MANUSIA :
 - ❖ TIPIKAL MANUSIA BERMACAM-MACAM, ADA YANG MENGARTIKAN POLITIK LEBIH MENITIKBERATKAN KEPADA :
 - KEKUASAAN (*STRUGGLE FOR POWER*) ;
 - DISTRIBUSI DAN ALOKASI NILAI-NILAI DALAM MASYARAKAT ;
 - SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DLL ;

PERBANDINGAN ILMU POLITIK DAN ILMU EKSAKTA

3. OBYEK PENYELIDIKAN YANG HIDUP
OBYEK MATERIAL ILMU POLITIK ADALAH MANUSIA (WARGANEGARA)
YANG HIDUP YAITU SESUATU YANG :
 - a. MEMILIKI KEINGINAN ;
 - b. MEMILIKI KEMAMPUAN ;
 - c. BERPERILAKU, SEHINGGA RELATIF LEBIH SULIT DIPELAJARI DIBANDING ILMU EKSAKTA, FISIKA, ILMU ALAM, DAN ILMU KIMIA ;
4. SEMUA PERSOALAN POLITIK BERSIFAT PERSONAL
 - a. BISA SETUJU ATAU MENOLAK TERHADAP DEMOKRASI BARAT DENGAN BERBAGAI ARGUMENTASINYA ;
 - b. PENOLAKAN SESEORANG NAMPAKNYA BERSIFAT OBYEKTIF, TETAPI PENILAIAN SESEORANG YANG DIDASARKAN KEPADA "VALUES" (NILAI) TENTANG BAIK DAN BURUK TETAP BERSIFAT "SUBYEKTIF" ;
 - c. LAIN HALNYA ORANG DENGAN "HUKUM GRAVITASI BUMI DARI NEWTON" DAN SIAPAPUN TAK DAPAT MENOLAK KEBENARANNYA ;
5. TIDAK TETAPNYA OBYEK PENYELIDIKAN
 - a. OBYEK PENYELIDIKAN POLITIK BERUBAH SETIAP SAAT ;
 - b. PERTAMA KITA MENYELIDIKI MASYARAKAT PRIMITIF, KEMUDIAN MASYARAKAT TRANSISI, BERIKUTNYA MASYARAKAT MODERN DAN TERAKHIR MASYARAKAT ULTRA MODERN. PROSES INI MASIH TERUS BERLANJUT DAN SELALU MENGALAMI PERUBAHAN ;

PERBANDINGAN ILMU POLITIK DAN ILMU EKSAKTA

6. MANUSIA BERKARAKTER
 - a. KITA MELIHAT MANUSIA HANYA DARI SOSOK SI MANUSIA YANG NAMPAK SAJA YAITU FISIKNYA YANG CANTIK, TINGGI, GEMUK, KURUS, DAN SEBAGAINYA, TETAPI KITA SULIT MELIHAT KARAKTERNYA ;
 - b. DEMIKIAN PULA KITA TIDAK BISA HANYA MEMPERBANDINGKAN SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN MELIHAT INSTITUSINYA SAJA, TETAPI HARUS DITELITI PULA PROSESNYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGANYA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN INSTITUSI LAINNYA, DSB.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan apa keterkaitan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain !
2. Mengapa ilmu politik selalu terkait dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain ?
3. Jelaskan satu persatu hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain dalam kehidupan modern saat ini?

Paket 4 KEKUASAAN POLITIK

Pendahuluan

Dalam paket 4 ini fokus kajiannya pada kekuasaan politik. Materi ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka mampu memahami arti kekuasaan yang ada dalam kajian politik. Pembahasan dalam paket ini mencakup arti kekuasaan politik, dimensi-dimensi kekuasaan politik, implementasi kekuasaan politik, distribusi atau saluran yang terkait dengan kekuasaan politik.

Cakupan materi dalam paket 4 ini merupakan materi pokok yang harus diketahui oleh mahasiswa agar mampu menguasai apa yang dimaksud dengan kekuasaan dalam politik, dimensi apa saja yang terkait dengan kekuasaan politik, bagaimana implementasi kekuasaan politik serta bagaimana kekuasaan politik tersebut diperoleh atau eksis.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi dan yang bisa juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar tentang keterkaitan antara berbagai komponen keilmuan yang semuanya diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan disampaikan oleh dosen.

Dengan pemaparan materi dan ilustrasi gambar ini, diharapkan mahasiswa mampu menyerap materi dengan baik sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan berbagai diskusi, dialog dan tanya jawab yang mengalir ke pola simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media, LCD, proyektor dan screen dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang kekuasaan yang terkait langsung dengan kajian dan dinamika politik.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang arti kekuasaan politik
2. Menjelaskan dimensi-dimensi kekuasaan politik
3. Menjelaskan implementasi atau pelaksanaan kekuasaan politik
4. Menjelaskan distribusi kekuasaan politik

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

- a. Arti kekuasaan politik
- b. Berbagai dimensi dalam kekuasaan politik
- c. Implementasi kekuasaan dalam politik
- d. Distribusi kekuasaan dalam politik

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan politik
3. Menjelaskan pengertian tentang kekuasaan politik
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Menjelaskan definisi kekuasaan politik
2. Menjelaskan berbagai dimensi dalam kekuasaan politik
3. Menjelaskan implementasi kekuasaan dalam politik
4. Menjelaskan tentang distribusi kekuasaan dalam politik
5. Presentasi hasil membaca
6. Penggunaan pola tanya jawab (dialogis) dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau mengkonfirmasi hasil pemahamannya.
7. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan

2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 5 tentang kewenangan dan legitimasi dalam politik.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa secara individual dan random untuk menjelaskan tentang arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.
2. Perhatikan arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.
3. Berikan respon verbal tentang arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.

Uraian Materi

KEKUASAAN POLITIK

Pendahuluan

Definisi Kekuasaan Politik

Definisi tentang kekuasaan politik telah banyak dikemukakan oleh para pakar sosiologi maupun ilmu politik. Syahril Syarbaini dkk. dengan mengutip karya Miriam Budiardjo menjelaskan antara lain :

- a. Menurut rumusan sosiologi versi **Max Weber** menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan yang dimiliki.
- b. Menurut rumusan klasik versi **Harold D. Lasswell** dan **Abraham Kaplan** menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan pihak kelompok pertama. Dengan bahasa yang lain menurut mereka berdua, yang dimaksud dengan kekuasaan (*power*) adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain dengan sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.
- c. Menurut ahli kontemporer **Narbara Goodwin**, menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh orang yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya dia tidak terlibat, artinya memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.²⁸

Dalam mengurai tentang konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani *Politeia* (berarti kiat memimpin kota (*polis*)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya dosen menyuruh mahasiswa membuat tugas yang tak akan mahasiswa lakukan tanpa perintah dosen (untuk saat itu), hal tersebut dapat diartikan dosen memiliki kekuasaan atas mahasiswanya. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.

Jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana politik adalah salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan "*how to get the power*". Ketika kita membicarakan politik, maka sebenarnya kita membicarakan suatu strategi bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan yang ingin dicapainya. Kekuasaan dalam politik artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak dicapainya.

Kekuasaan dalam politik kadang kelihatannya sangat "kotor", karena strategi seseorang atau kelompok dalam berpolitik memungkinkan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya harus

²⁸ Syarbaini, Syahril, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 26

mengorbankan seseorang atau kelompok lainnya. Dengan berbagai alasan apakah tidak satu ideologi sampai kepada tidak sepaham secara budaya atau dogmatis agama. Kekuasaan yang diperoleh karena politik adalah upaya untuk menguasai masyarakat kebanyakan (*pupils*) secara ideologi sehingga pemilik kekuasaan berada pada posisi tertinggi atau sering disebut kaum “elit”.

Kaum elit sebagai minoritas adalah kelompok mayoritas dalam kekuasaan, sehingga segala bentuk perilaku masyarakat kebanyakan sering diindahkan sebagai perilaku yang harus seragam. Keseragaman dalam kacamata politik berbentuk statemen yang kemudian diturunkan menjadi sebuah kebijakan bagi masyarakat kebanyakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kaum elit akan mengatur segala perilaku orang dalam menjalankan dan memberikan sumbangsih terhadap kehidupan, baik dalam kehidupan bernegara bahkan sampai kepada kehidupan bermasyarakat.

Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi (*manipulation*), paksaan (*coercion*), tekanan (*force*), kewenangan (*authority*). Keenam konsep ini merupakan bentuk-bentuk kekuasaan.²⁹ Mengenai keenam bentuk kekuasaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengaruh (*influence*) maksudnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.
- b. Persuasi (*persuasion*) maksudnya adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.
- c. Manipulasi (*manipulation*) maksudnya adalah orang yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan.
- d. Paksaan (*coercion*) maksudnya adalah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, semisal penangkapan polisi dan militer dan sebagainya.
- e. Tekanan (*force*) maksudnya adalah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit atau membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu.
- f. Kewenangan (*authority*) maksudnya adalah dengan jabatan yang dimiliki, seseorang memiliki kewenangan untuk memerintah orang lain untuk mengikuti perintah dari pemegang kewenangan (pejabat) tersebut.

Dalam konteks hubungan kekuasaan, pasti terdapat tiga unsur penting yang melekat dalam kekuasaan tersebut, antara lain, *pertama*, adanya niat dan tujuan (motivasi/dorongan), *kedua*, cara menggunakan sumber-sumber kekuasaan dan *ketiga*, hasil akhir dari penggunaan atau pemanfaatan kekuasaan tersebut.

Ada beberapa ciri yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan dalam dinamika kehidupan politik, antara lain :

1. Kekuasaan merupakan hubungan antar sesama manusia.
2. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain.
3. Pemegang kekuasaan dapat berupa seorang individu, kelompok, organisasi ataupun pemerintah.
4. Sasaran kekuasaan (pihak yang dipengaruhi) bisa berupa individu, kelompok, organisasi dan juga pemerintah.

²⁹ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 57.

5. Pemilik kekuasaan belum tentu dianggap memiliki kekuasaan, jika tidak menggunakan sumber-sumber kekuasaan secara efektif.
6. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan sangat dimungkinkan menggunakan cara paksaan, melalui konsensus atau justru kombinasi keduanya.
7. Kekuasaan itu sangat bergantung pada perspektif moral yang digunakan, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai tersebut baik ataukah justru buruk.
8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan sekelompok kecil dalam masyarakat. Hal ini sangat bergantung pada ada atau tidaknya distribusi kekuasaan yang relatif merata dalam masyarakat tersebut.
9. Mayoritas kekuasaan politik memiliki makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang sifatnya pribadi cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat.
10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses-proses politik.³⁰

Dimensi-dimensi Kekuasaan Politik

- a. Dalam konteks eksistensinya, kekuasaan terbagi dalam dua bagian, yakni potensial dan aktual. Kekuasaan bisa disebut potensial, apabila seseorang dipandang memiliki kekuasaan yang sangat potensial sebagai sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan materi, aset tanah yang sangat luas (tuan tanah), memiliki senjata, nilai intelektualitas yang tinggi, kaya informasi, memiliki popularitas, status sosial yang tinggi, memiliki massa (komunitas) yang terorganisir serta memiliki jabatan strategis. Seseorang dianggap memiliki kekuasaan aktual, jika orang tersebut mampu menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif untuk memperoleh tujuan yang diinginkan dirinya.
- b. Dalam konteks cara atau modusnya, kekuasaan politik terbagi dalam dua perspektif, yakni konsensus (kesepakatan) dan paksaan. Artinya, kekuasaan politik bisa diperoleh dengan cara konsensus dan ada pula dengan cara paksaan. Dalam realitas politik, kedua perspektif tersebut selalu mewarnai. Jika dalam memperoleh kekuasaan politik menggunakan paksaan, maka cenderung memandang politik itu sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi dan konflik. Mereka melihat tujuan yang ingin dicapai oleh elit politik tidak menyangkut untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, melainkan menyangkut kepentingan kelompok kecil masyarakat. Demikian pula sebaliknya, jika dalam memperoleh kekuasaan politik dengan cara membangun konsensus (kesepakatan), maka cenderung melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan sumber kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan yakni kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Dalam konteks tujuan, kekuasaan politik terbagi pada sisi positif dan negatif. Kekuasaan positif maksudnya adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sedangkan kekuasaan negatif maksudnya adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain agar tidak bisa mencapai tujuannya.
- d. Dalam konteks status pemegang kekuasaan, kekuasaan politik terbagi dalam dua kategori, yakni jabatan dan pribadi. Bagi negara yang sudah maju, tentu kekuasaan sangat erat kaitannya dengan jabatan tanpa memandang kualitas pribadinya, sehingga dengan jabatannya seseorang memiliki

³⁰ Ibid, 58-59.

kekuasaan formal yang sangat besar, seperti contoh jabatan Presiden, Perdana Menteri, Menteri dan atau senator/DPR (*house of representative*). Namun demikian, penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan tersebut secara efektif sangat bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki. Sebaliknya, pada kehidupan masyarakat yang sederhana, struktur kekuasaan yang didasarkan pada kualitas pribadi tampak lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Efektifitas kekuasaan tersebut lahir dari kualitas pribadi yang dimiliki oleh orang tersebut, semisal kharisma, asal-usul keturunan (keluarga), stratifikasi sosial yang tinggi serta faktor adanya wahyu dari Allah.

- e. Dalam konteks keterkaitan, kekuasaan terbagi dalam dua kriteria, yakni implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit maksudnya adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan hasilnya. Sedangkan kekuasaan eksplisit maksudnya adalah pengaruh yang secara jelas terlihat dan juga bisa dirasakan hasilnya.
- f. Dalam konteks dinamikanya, kekuasaan bisa bersifat langsung dan juga tidak langsung. Kekuasaan langsung maksudnya adalah bahwa penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara (*mediator*). Sebagai ilustrasi contoh, seluruh anggota DPR-RI/DPD-RI melobi Presiden agar tidak jadi menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak), TDL (tarif dasar listrik), dan sebagainya, itupun dilakukan dengan komunikasi langsung dalam satu meja diskusi. Sedangkan kekuasaan tidak langsung maksudnya adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diyakini memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik tersebut. Sebagai contoh, mengingat DPD/DPR tidak mampu mempengaruhi Presiden dalam melobi agar BBM/TDL tidak jadi dinaikkan, maka DPD/DPR memanfaatkan sumber pengaruh yang lain yang dianggap memiliki pengaruh lebih besar yakni dengan memobilisasi massa atau konstituen partai politik untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk menuntut pemerintah agar tidak jadi menaikkan BBM/TDL tersebut.

Pelaksanaan Kekuasaan Politik

Ada tiga pilar utama yang diamati oleh ilmu politik terkait dengan kekuasaan politik, antara lain, *pertama*, bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan, *kedua*, bagaimana kekuasaan tersebut didistribusikan dan *ketiga*, mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada orang atau kelompok lain dalam situasi atau kondisi tertentu.³¹

Terkait dengan pelaksanaan kekuasaan politik atau penggunaan sumber-sumber kekuasaan, maka terdapat empat faktor yang harus dikaji secara serius, antara lain :

1. Bentuk dan jumlah sumber

Sumber kekuasaan bisa beraneka ragam, antara lain sarana paksaan fisik, orang kaya, punya popularitas, memiliki massa yang terorganisir, dan lain-lain. Dalam konteks kekuasaan politik antar negara, bisa berupa kepemilikan nuklir oleh satu pihak dan tidak memiliki nuklir oleh pihak yang lain. Menurut Boulding, sumber kekuasaan ada 3 macam, yakni kekuasaan ancaman, kekuasaan ekonomi & kekuasaan pemersatu.

2. Distribusi sumber dalam masyarakat

³¹ Ibid, 64

Dalam kehidupan masyarakat dengan struktur sederhana, maka distribusi kepemilikan sumber cenderung merata, karena jumlahnya sangat sedikit dan cenderung bersifat kekeluargaan. Sedangkan pada kehidupan masyarakat dengan struktur modern, maka distribusi kekuasaan cenderung tidak merata, karena berdasarkan individualistik dan egoistik. Sementara bagi negara yang kehidupan masyarakat sudah maju, maka distribusi kekuasaannya cenderung lebih merata daripada negara berkembang, karena negara yang telah maju selalu berjuang agar masyarakatnya bisa hidup layak dalam kondisi kemoderenan/kemajuan.

3. Waktu seseorang atau kelompok dalam menggunakan sumber-sumber

Kekuasaan politik sangat bergantung pada waktu kapan sumber-sumber kekuasaan akan dilakukan sebagai upaya mencapai hasil yang ingin dituju. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan dapat berjalan efektif dan efisien, jika waktu yang ditentukan tepat dan akurat, sehingga dengan ketepatan waktu penggunaannya mampu memperoleh hasil yang maksimal.

4. Hasil akhir dari penggunaan sumber-sumber kekuasaan

Setelah melalui ketiga tahap diatas, maka tentu bisa diketahui hasil dari penggunaan sumber-sumber kekuasaan politik sebagai tujuan yang ingin diraihinya. Jika proses ketiga tahapan tersebut bisa dilalui dengan baik dan sistematis, maka tentu hasilnya bisa maksimal sesuai harapan. Sebaliknya, jika ketiga tahapan diatas, tidak mampu dilakukan dengan sistematis, maka pasti berpengaruh pada hasil perolehan tujuan tersebut.

Dengan mengkaji keempat faktor tersebut, maka dapat diketahui situasi dan kondisi yang paling efektif dan efisien dalam melaksanakan kekuasaan politik tersebut. Pelaksanaan kekuasaan politik sangat ditentukan oleh berjalannya berbagai proses dan dinamika yang dijalaninya.

Distribusi Sumber Kekuasaan Dalam Masyarakat

Distribusi sumber-sumber kekuasaan tidak pernah merata dalam kehidupan masyarakat atau sistem politik, karena kemampuan setiap orang pasti berbeda dan bervariasi antara satu dengan yang lain. Ketidak-mampuan seseorang tersebut sangat mungkin diciptakan oleh keberadaan orang/pihak lain ataupun juga memang seseorang tersebut sudah tidak memiliki semangat untuk mengubah nasib hidupnya sendiri.

Bagi masyarakat yang strukturnya masih sangat sederhana, maka distribusi pemilikan sumber-sumber kekuasaan relatif merata, sebab selain sumber-sumber kekuasaan yang tersedia masih sedikit, juga karena hubungan antar sesama dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan hubungan dengan pemimpin didasarkan pada prinsip *primus inter pares*. Ketika masyarakat dengan struktur sederhana melakukan perubahan (modernisasi), maka pasti terjadi kesenjangan karena sebagian masyarakat tidak ikut dalam proses perubahan tersebut. Hubungan antar sesama lebih didasarkan pada egoisme, hubungan dengan pemimpin menjadi hubungan hirarkhis. Alhasil, distribusi sumber-sumber kekuasaan di negara-negara berkembang cenderung tidak merata.

Sementara bagi negara-negara maju, distribusi sumber-sumber kekuasaan cenderung lebih merata daripada negara-negara berkembang, oleh karena lebih banyak mengangkat kehidupan masyarakat pada tingkat kehidupan yang lebih baik. Distribusi sumber-sumber kekuasaan di negara-negara maju ini banyak ditentukan oleh beberapa faktor penting, antara lain, susunan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakatnya, perkembangan teknologinya, tipologi birokrasi, jenis dan kualitas pengadaan barang dan jasa di wilayah negara tersebut.

Bagi ilmuwan ekonomi, pola pikir yang berkembang adalah bagaimana meningkatkan produksi barang dan jasa mampu berjalan dengan baik, sedangkan bagi ilmuwan politik adalah bagaimana menciptakan sistem politik yang mampu mendistribusikan sumber merata untuk semua masyarakat.

Hasil Penggunaan Sumber-sumber Kekuasaan

Dari berbagai proses diatas, maka konsekuensi logisnya melahirkan hasil dari penggunaan sumber-sumber kekuasaan, yang antara lain, jumlah individu yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, sektor-sektor kehidupan yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan dan kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat.

Metode Perolehan Kekuasaan

- 1) Paksaan : Penggunaan tekanan fisik
- 2) Persuasi : Kemampuan meyakinkan dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu
- 3) Otoritas : Kekuasaan yang disetujui rakyat dan melekat pada jabatan
- 4) Manipulasi : Penggunaan pengaruh, dalam hal yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi pemegang kekuasaan

Distribusi Model

Model Elitis

Asumsinya :

1. Distribusi sumber kekuasaan dalam masyarakat tidak merata. Jumlah orang yang memiliki kekuasaan sedikit bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat.
2. Orang yang memerintah suatu masyarakat atau negara selalu lebih sedikit daripada yang diperintah atau yang memerintah.
3. Antar elit politik selalu terdapat kesamaan nilai dan selalu mempertahankan status elit mereka.

Status Yang Digunakan

1. Analisa posisi, artinya suatu analisa untuk mengetahui siapa yang berkuasa dengan melihat posisi atau kedudukannya dalam suatu lembaga
2. Analisa keputusan, artinya untuk mengetahui siapa yang berkuasa dengan meneliti dan mengamati siapa yang ikut mengambil keputusan melalui beberapa kasus pengambilan keputusan yang dianggap cukup representatif.
3. Analisa reputasi, artinya untuk mengetahui siapa yang berkuasa yang tidak berdasarkan bagan institusi formal, akan tetapi kekuasaan mereka secara informal (Robert Putnam).

Model Pluralis

Asumsinya :

1. Setiap anggota masyarakat tergabung ke dalam organisasi tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya, baik yang bersifat ideologis, ekonomi maupun kultural.
2. Setiap kelompok selalu berusaha mempertahankan otonomi dan karakteristiknya, baik dari kelompok lain atau intervensi pemerintah.

3. Politik menurut pendekatan ini merupakan kegiatan kelompok utk mempengaruhi keputusan pemerintah
4. Tujuan utama setiap kelompok adalah memperoleh kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah sehingga menguntungkan mereka. Kapasitas pengaruh kelompok kepentingan ditentukan oleh “akses” yaitu kesempatan suatu kelompok untuk mengadakan kontak dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

1. Kohesi kelompok (loyalitas keluarga terhadap anggota)
2. Organisasi kompleks
3. Status (posisi kelompok dalam struktur sosial)
4. Kepemimpinan kelompok
5. Kekayaan, teknologi, informasi, senjata dan hak moral

Model Populis

Asumsinya

1. Setiap warga negara yang telah dewasa, secara potensial memiliki kekuasaan politik, seperti hak memilih.
2. Setiap warga negara memiliki perhatian dan minat yang besar terhadap proses politik, karena itu setiap warga negara mempunyai potensi untuk aktif dalam politik.
3. Setiap warga negara mempunyai kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap proses politik, karena mereka mempunyai informasi politik yang akurat dalam jumlah yang memadai.

Untuk uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

KEKUASAAN POLITIK

KONSEP

Kekuasaan politik : Kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain melalui pendapat yang disatukan dari beberapa tokoh.

Kongkritnya kekuasaan politik adalah kemampuan menggunakan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya.

SUMBER UTAMA

- ✓ Sarana paksaan fisik
- ✓ Kekayaan
- ✓ Jabatan atau kewenangan
- ✓ Keahlian
- ✓ Informasi
- ✓ Popularitas pribadi
- ✓ Massa terorganisasi
- ✓ Teknologi

SUMBER PELENGKAP

- ✓ Waktu (Time)
- ✓ Ketrampilan (Skill)
- ✓ Perhatian pada proses politik

KRITERIA KEKUASAAN POLITIK

- Influence : Mempengaruhi perilaku dan sikap org lain agar dg sukrela ke kita
- Persuasion : Meyakinkan org dg argumentasi agar melakukan sesuatu
- Manipulation : Perilaku mamatuhi org lain scr tdk sadar
- Coercion : Menekan org dg ancaman paksaan agar bisa taat
- Force : Menekan fisik biologis org (sakit) agar bisa melakukan sesuatu
- Authority : Wewenang

TIGA UNSUR HUBUNGAN KEKUASAAN

1. Tujuan
2. Cara penggunaan sumber pengaruh
3. Hasil penggunaan

CIRI HUBUNGAN KEKUASAAN

- Kekuasaan mrpk hubungan antar manusia
- Pemegang kekuasaan mempengaruhi org lain
- Pemegang kekuasaan dpt Individu, kelompok, organisasi dan negara
- Sasaran kekuasaan dpt berupa Individu, kelompok, organisasi dan negara
- Pemegang kekuasaan blm tentu punya kekuasaan, jika tdk mampu menggunakan sumber scr efektif
- Penggunaan kekuasaan bs dg paksaan, consensus & kombinasi keduanya
- Tujuan kekuasaan dinilai scr moral (baik dan buruk)
- Hasil sumber pengaruh tsb bisa dinikmati seluruh masyarakat ataukah kelompok
- Kekuasaan politik punya makna → KP besar utk kepentingan umum, sdg KP pribadi utk kepentingan pribadi
- Kekuasaan yg beraspek politik mrpk penggunaan sumber pengaruh utk mempengaruhi proses politik

DIMENSI-DIMENSI KEKUASAAN

- a. **Potensial** : Memiliki sumber-sumber kekuasaan
- b. **Aktual** : Menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki dalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuan)
- a. **Konsensus** : Kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan (dapat persetujuan secara sadar)
- b. **Paksaan** : Kekuasaan digunakan untuk mendominasi yang melahirkan konflik
- a. **Positif** : Penggunaan sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang penting
- b. **Negatif** : Penggunaan sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain dalam mencapai tujuan yang dipandang tidka perlu
- a. **Implisit** : Pengaruh kekuasaan yang tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan
- b. **Eksplisit** : Pengaruh kekuasaan yang secara jelas terlihat dan dapat dirasakan
- a. **Langsung** : Penggunaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat / pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan scr langsung tanpa perantara
- b. **Tdk Lgsg** : Melalui perantara yang diperkirakan memiliki pengaruh lebih besar
- a. **Jabatan** : Kekuasaan yang melekat pada jabatan
- b. **Pribadi** : Kekuasaan yang melekat pada kualitas pribadi

TEMPAT KEKUASAAN

- 1) Keluarga
- 2) Asosiasi masyarakat sipil
- 3) Negara
- 4) Pemerintah

HASIL KEKUASAAN POLITIK

- 1)Jumlah individu yang dikendalikan
- 2)Bidang-bidang kehidupan yang dikendalikan
- 3)Kedalaman pengaruh kekuasaan

METODE PEROLEHAN KEKUASAAN

- 1)**Paksaan** : Penggunaan tekanan fisik
- 2)**Persuasi** : Kemampuan meyakinkan dg argumentasi utk melakukan sesuatu
- 3)**Otoritas** : Kekuasaan yang disetujui rakyat dan melekat pada jabatan
- 4)**Manipulasi** : Penggunaan pengaruh, dalam hal yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi pemegang kekuasaan

DISTRIBUSI MODEL

A. ELITIS

ASUMSI

1. Distribusi sumber kekuasaan dalam masyarakat tidak merata. Jumlah orang yang memiliki kekuasaan sedikit bila dibandingkan dengan org yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat
2. Orang yang memerintah suatu masyarakat atau negara selalu lebih sedikit daripada yang diperintah atau yang memerintah.
3. Antar elit politik selalu terdapat kesamaan nilai dan selalu mempertahankan status elit mereka.

STATUS YANG DIGUNAKAN

1. **Analisa posisi** : Suatu analisa untuk mengetahui siapa yang berkuasa dengan melihat posisi atau kedudukannya dalam suatu lembaga
2. **Analisa keputusan** : Untuk mengetahui siapa yang berkuasa dengan meneliti dan mengamati siapa yang ikut mengambil keputusan melalui beberapa kasus pengambilan keputusan yang dianggap cukup representatif.
3. **Analisa Reputasi** : Untuk mengetahui siapa yang berkuasa yang tidak berdasarkan bagan institusi formal, akan tetapi kekuasaan mereka secara informal (Robert Putnam).

B. PLURALIS

ASUMSI

1. Setiap anggota masyarakat tergabung ke dalam organisasi tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya, baik yang bersifat ideologis, ekonomi maupun kultural.
2. Setiap kelompok selalu berusaha mempertahankan otonomi dan karakteristiknya, baik dari kelompok lain atau intervensi pemerintah.
3. Politik menurut pendekatan ini merupakan kegiatan kelompok utk mempengaruhi keputusan pemerintah
4. Tujuan utama setiap kelompok adalah memperoleh kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah sehingga menguntungkan mereka. Kapasitas pengaruh kelompok kepentingan ditentukan oleh "akses" yaitu kesempatan suatu kelompok untuk mengadakan kontak dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. Kohesi kelompok (loyalitas keluarga terhadap anggota)
2. Organisasi kompleks
3. Status (posisi kelompok dalam struktur sosial)
4. Kepemimpinan kelompok
5. Kekayaan, teknologi, informasi, senjata dan hak moral

C. POPULIS

ASUMSI

1. Setiap warga negara yang telah dewasa, secara potensial memiliki kekuasaan politik, seperti hak memilih.
2. Setiap warga negara memiliki perhatian dan minat yang besar terhadap proses politik, karena itu setiap warga negara mempunyai potensi untuk aktif dalam politik
3. Setiap warga negara mempunyai kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap proses politik, karena mereka mempunyai informasi politik yang akurat dalam jumlah yang memadai.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan politik !
2. Apa saja dimensi-dimensi kekuasaan politik ?
3. Bagaimana cara melaksanakan kekuasaan politik ?
4. Jelaskan satu persatu distribusi kekuasaan politik?

Paket 5 KEWENANGAN DAN LEGITIMASI

Pendahuluan

Dalam paket 5 ini fokus kajiannya pada kewenangan dan legitimasi. Materi ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka mampu memahami arti kewenangan dan legitimasi yang ada dalam kajian politik. Pembahasan dalam paket ini mencakup definisi kewenangan dan legitimasi, perbedaan tugas, kewenangan dan fungsi, sumber kewenangan, peralihan kewenangan, sikap terhadap kewenangan, definisi legitimasi, obyek legitimasi, kadar legitimasi, cara mendapatkan legitimasi, tipe legitimasi, pentingnya legitimasi dan krisis legitimasi.

Cakupan materi dalam paket 5 ini merupakan materi pokok yang harus diketahui oleh mahasiswa agar mampu menguasai apa yang dimaksud dengan definisi kewenangan dan legitimasi, perbedaan tugas, kewenangan dan fungsi, sumber kewenangan, peralihan kewenangan, sikap terhadap kewenangan, definisi legitimasi, obyek legitimasi, kadar legitimasi, cara mendapatkan legitimasi, tipe legitimasi, pentingnya legitimasi dan krisis legitimasi.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi dan yang bisa juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar tentang keterkaitan antara berbagai komponen keilmuan yang semuanya diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsepsi dan disampaikan oleh dosen.

Dengan pemaparan materi dan ilustrasi gambar ini, diharapkan mahasiswa mampu menyerap materi dengan baik sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan berbagai diskusi, dialog dan tanya jawab yang mengalir ke pola simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media, LCD, proyektor dan screen dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang kewenangan dan legitimasi dalam kajian ilmu politik.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang arti kewenangan dan legitimasi
2. Menjelaskan tentang sumber dan peralihan kewenangan
3. Menjelaskan tentang obyek, kadar dan cara mendapatkan legitimasi
4. Menjelaskan tentang krisis legitimasi

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

- a. Definisi kewenangan dan legitimasi
- b. Perbedaan tugas, kewenangan dan fungsi
- c. Sumber kewenangan, peralihan kewenangan, sikap terhadap kewenangan
- d. Definisi legitimasi, obyek legitimasi, kadar legitimasi, cara mendapatkan legitimasi, tipe legitimasi, pentingnya legitimasi dan krisis legitimasi.

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan kewenangan dan legitimasi.
3. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Menjelaskan definisi kewenangan dan legitimasi
2. Menjelaskan perbedaan tugas, kewenangan dan fungsi
3. Menjelaskan sumber kewenangan, peralihan kewenangan dan sikap terhadap kewenangan.
4. Menjelaskan definisi legitimasi, obyek legitimasi dan kadar legitimasi
5. Menjelaskan cara mendapatkan legitimasi, tipe legitimasi, pentingnya legitimasi dan krisis legitimasi.
6. Presentasi hasil membaca
7. Penggunaan pola tanya jawab (dialogis) dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau mengkonfirmasi hasil pemahamannya.
8. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 6 tentang partai politik.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang arti kewenangan dan legitimasi dalam kajian ilmu politik.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang arti kewenangan dan legitimasi dalam kajian ilmu politik.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa secara individual dan random untuk menjelaskan tentang arti kewenangan, sumber, peralihan dan sikap terhadap kewenangan, definisi legitimasi, obyek, kadar dan cara mendapatkan legitimasi, tipe legitimasi, pentingnya legitimasi serta krisis legitimasi.
2. Berikan respon verbal tentang arti kewenangan, sumber, peralihan dan sikap terhadap kewenangan, definisi legitimasi, obyek, kadar dan cara mendapatkan legitimasi, tipe legitimasi, pentingnya legitimasi serta krisis legitimasi yang telah dipahami oleh mahasiswa.

Uraian Materi

KEWENANGAN DAN LEGITIMASI

Definisi Kewenangan

Asumsi dasar menyatakan bahwa setiap pemerintahan pasti memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya agar mampu berjalan sesuai dengan tujuan negaranya. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan wujud konkrit dari kedaulatan rakyat yang telah memberikan amanah kepada pemerintahnya. Kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah (Presiden atau Perdana Menteri) tersebut, tentu memiliki konsekuensi munculnya kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Menurut Ramlan Surbakti kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan (tidak harus berbentuk formal melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) dan atau prosesi pelantikan dan serah terima kekuasaan). Jadi, intinya kewenangan pasti kekuasaan, tapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.³²

Wewenang adalah kekuasaan yang terdapat pada seseorang karena mendapat pengakuan atau dukungan dari masyarakat.³³ Kewenangan dapat menimbulkan hak-hak tertentu pada penguasa yang memungkinkan ia melakukan suatu kebijakan. Sifat dari kewenangan adalah *top-down*, yakni dari penguasa ke rakyat. Wewenang itu timbul karena dukungan dari rakyat tersebut memberikan semacam hak bagi penguasa untuk melakukan kebijakan berkaitan dengan tugasnya. Hubungan timbal-balik tersebut timbul karena adanya suatu kesepakatan antara yang memimpin dengan yang yang dipimpin. Kekuasaan dalam arti kewenangan diartikan bahwa pemegang kekuasaan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar masyarakatnya. Kewenangan ini tidak sama pada setiap pemegang kekuasaan.³⁴

Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Orang yang mempunyai kekuasaan politik belum tentu memiliki hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Sedangkan orang yang memiliki kewenangan politik berarti memiliki hak moral. Prinsip kewenangan hak moral adalah menentukan siapa yang berhak memerintah dan mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Prinsip moral dapat diwujudkan melalui hukum yang tertulis dan dapat pula diwujudkan melalui tradisi atau hukum yang tidak tertulis. Nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan politik.

Perbedaan Tugas, Wewenang dan Fungsi

Ada perbedaan mendasar antara tugas, wewenang dan kewajiban. Tugas adalah pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Tugas adalah segala bentuk pekerjaan yang telah ditentukan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab untuk dilakukan oleh seseorang yang diberi amanah jabatan. Sedangkan wewenang adalah hak moral yang melekat pada jabatan

³² Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 85.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2010), 228.

³⁴ Moh. Kusnardi, dkk. *Ilmu Negara*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005), 120.

seseorang untuk melakukan perintah dan pelayanan kepada kepentingan publik. Sementara fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Sumber Kewenangan

Setiap orang yang mempunyai hak untuk memerintah selalu menunjukkan sumber haknya. Sumber kewenangan untuk memerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak Memerintah Berasal dari Tradisi

Hak memerintah yang berasal dari tradisi maksudnya adalah bahwa setiap hak yang diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sebagai sesuatu yang kebenarannya selalu dipelihara dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini ilustrasi contohnya budaya kraton di beberapa daerah yang masih melestarikan tradisi yang kuat seperti di wilayah Jogjakarta yang pola kepemimpinannya turun-temurun dengan sistem kesultanan, yang kini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jika beliau mangkat (wafat), maka pasti digantikan oleh turunan beliau.

2. Hak Memerintah Berasal dari Tuhan

Hak ini didasarkan pada kepemilikan kekuatan yang sakral yang berasal dari Tuhan (yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Muslim) dan atau Dewa (bagi yang non-muslim). Artinya, seseorang berhak memerintah orang atau pihak lain karena dia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berasal dari Tuhannya. Seperti Nabi Muhammad SAW. memerintah umat manusia karena memang beliau diberi mandat langsung oleh Allah SWT. Dalam konteks kenegaraan terkini, seperti Raja Abdullah (Arab Saudi), Kaisar Hirohito yang meninggal tahun 1989 dan kini diganti oleh Akihito (lahir 23 Desember 1933 dari pasangan kaisar Hirohito dengan Maharani Kojun) sebagai kaisar Jepang ke-125, semuanya berasal Dewa Matahari (Amaterasu Omikami).

3. Hak Memerintah Berasal dari Kualitas Pribadi

Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi ini maksudnya seseorang yang memiliki kualitas pribadi yang populis, sehingga dengan modal tersebut dia memiliki kharisma yang mampu menarik orang lain atau kelompok masyarakat untuk mengikuti perintahnya. Pemimpin yang kharismatik dan populer ini bersifat personal dan tidak bisa diwariskan pada keturunannya, karena belum tentu keturunannya bisa memiliki hal yang sama dengan orang tuanya.

4. Hak Memerintah Berasal dari Sumber yang Bersifat Instrumental

Hak memerintah yang berasal dari instrumental ini adalah hak yang melekat pada seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu dan belum tentu dimiliki oleh orang lain. Hak ini bersifat sangat spesifik, karena tidak semua orang punya hal yang sama. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah proses di pengadilan tentang kasus asusila (maaf, video porno), dimana para hakim dalam membuktikan keaslian foto atau video tersebut membutuhkan keahlian seseorang untuk mendeteksi keaslian dan akurasi hasil pemotretan, baik mengenai waktunya, tempatnya, kapan diambil, melalui jenis kamera jenis dan merk apa, dan seterusnya. Tentu saja, untuk membuktikan hal-hal tersebut membutuhkan keahlian dari seorang ahli telematika. Dengan hasil temuan ahli telematika tersebut, maka hakim bisa mengambil keputusan vonis kepada seorang tersangka kasus tersebut. Demikian juga dengan pengungkapan berbagai kasus lain yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini.

5. Hak Memerintah Berasal dari Undang-undang

Maksud dari hak memerintah yang berasal dari undang-undang adalah bahwa seseorang yang memiliki hak untuk memerintah yang didasarkan pada prosedur, syarat dan ketentuan yang

dilandaskan pada undang-undang yang mengaturnya. Sebagai ilustrasi dari hak memerintah semacam ini adalah seperti di Indonesia yang setiap lima tahun sekali melakukan pesta demokrasi dengan memilih Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Desa. Mereka dipilih melalui mekanisme dan prosedur Pemilihan Umum (Pemilu) langsung. Mereka telah diatur oleh undang-undang Pilpres, Pilkada dan Pilkades. Sumber kewenangan yang dimiliki oleh para pemimpin tersebut adalah berasal dari hukum dan perundang-undangan yang telah disusun oleh rakyat melalui perwakilannya di DPR dan DPD.

Kelima sumber kewenangan diatas, dapat disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan utama, yakni kewenangan yang bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial. Kewenangan yang bersifat prosedural adalah hak memerintah yang berdasarkan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis. Kewenangan yang bersifat substansial adalah kewenangan atau hak memerintah yang berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri para pemimpin tersebut, seperti tradisi, kualitas pribadi, kesakralan dan instrumental (keahlian).

Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa semakin kompleks struktur masyarakat di suatu negara, maka tipe kewenangan yang digunakan cenderung bersifat prosedural. Struktur masyarakat yang kompleks diindikasikan oleh adanya differensiasi struktur dan spesialisasi peranan serta hubungan impersonal, sehingga masyarakat memerlukan pengaturan-pengaturan yang bersifat tertulis dan rasionalitas. Sebaliknya, masyarakat yang strukturnya semakin sederhana, maka cenderung menggunakan tipe kewenangan yang bersifat substansial karena kehidupan lebih banyak berdasarkan tradisi, kepercayaan pada kekuatan supranatural dan kesetiaan pada pemimpin. Masyarakat yang menggunakan tipe kewenangan yang berdasarkan prosedural, maka lebih dominan menggunakan prosedur hukum tertulis dan prosedur hukum tak tertulis. Sebaliknya, tipe masyarakat yang menggunakan struktur sederhana, lebih dominan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sakral seperti adat-istiadat, tradisi, kebiasaan yang cenderung religius, sehingga dianggap tidak dapat diubah.³⁵

Peralihan Kewenangan

Secara kodrati, manusia pasti memiliki batas akhir kehidupan (mati). Demikian pula kewenangan juga memiliki batas akhir sebagai pertanda selesainya periode atau berakhirnya umur manusia tersebut. Seirama dengan hal tersebut, maka kewenangan jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang dan menjalankan fungsi (tugas dan kewenangan) jabatan bersifat tidak tetap. Artinya, selain umur manusia terbatas, kemampuan dan kearifan manusia juga terbatas.

Menurut Paul Conn secara umum terdapat tiga cara peralihan kewenangan, yakni secara turun-temurun, pemilihan, dan paksaan. Peralihan kewenangan secara turun-temurun ialah jabatan dan kewenangan yang dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu. Hal ini dipraktekkan dalam sistem politik otokrasi tradisional, seperti kerajaan dan kesultanan. Peralihan kewenangan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD). Hal ini dipraktekkan dalam sistem politik demokrasi. Peralihan kewenangan secara paksaan ialah jabatan dan kewenangan yang terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain dengan tidak mengikuti prosedur yang sudah disepakati, melainkan dengan menggunakan kekerasan,

³⁵ Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 88.

seperti revolusi, kudeta serta ancaman kekerasan (paksaan tak berdarah). Pada umumnya cara ini berlangsung dalam masyarakat atau negara yang sistem politiknya masih belum stabil.³⁶

>Sikap Terhadap Kewenangan

Jika penguasa, pemimpin atau pejabat yang memiliki kewenangan (otoritas) atas dasar mekanisme prosedural maupun substancial, maka secara otomatis masyarakat pasti memiliki sikap atas kewenangan yang dimiliki oleh penguasa, pemimpin dan pejabat tersebut.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pada umumnya sikap atas kewenangan dapat dikelompokkan menjadi sikap menerima, mempertanyakan (skeptis), dan kombinasi keduanya. Dibawah ini contoh dari Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia tentang sikap-sikap anggota masyarakat terhadap kewenangan yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial (pribadi).

Pertama, sikap masyarakat Amerika Serikat terhadap kewenangan prosedural merupakan perpaduan antara sikap legistik dan skeptis atas hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, di satu pihak masyarakat Amerika merupakan bangsa yang legalistik, serba hukum, di pihak lain pada umumnya juga mempertanyakan hukum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan amandemen ataupun perubahan hukum. Pada umumnya terhadap kewenangan pribadi, masyarakat Amerika di satu pihak mereka menolak kewenangan hanya karena orang itu memiliki kualitas pribadi karena kharisma maupun popularitas pribadi, di pihak lain apabila orang itu terpilih berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang maka mereka akan menerima dan mendukung kewenangan tersebut.

Kedua, sikap masyarakat Inggris atas kewenangan prosedural tidak sekental sikap masyarakat Amerika karena Inggris tidak memiliki konstitusi. Hukum yang mengatur masyarakat cenderung tidak terlalu formal atau legalistik karena kesepakatan yang tak tertulis masih dihargai sama pentingnya dengan ketentuan tertulis. Sejalan dengan hal itu, sikap masyarakat Inggris terhadap kewenangan pribadi dapat dikatakan menerima sebagaimana terbukti atas kewenangan kerajaan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk secara horisontal seperti suku bangsa maupun secara vertikal seperti kota-desa dan terpelajar-tak terpelajar. Masyarakat Amerika dan Inggris tidak bersifat majemuk, tetapi telah terwujud suatu pola sikap terhadap kewenangan. Sebaliknya, di Indonesia sikap itu masih beraneka ragam.³⁷

Sebagai contoh di Indonesia saat ini, dengan adanya Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 lalu dengan dua pasangan kandidat, yakni pasangan nomor urut 1 pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan pasangan nomor 2 Jokowi-JK, dan *ending*-nya terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. Dalam konteks sikap masyarakat, tentu saja masyarakat ada yang pro dan adapula yang kontra terhadap masing-masing pihak. Apalagi dalam perebutan kekuasaan di lembaga tinggi negara yakni sebagai Ketua DPR dan MPR yang memakan waktu yang sangat lama serta alot dan kemudian dimenangkan oleh pihak Koalisi Merah Putih (KMP) dari pihak Prabowo Subianto, sementara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dari pihak Jokowi dalam posisi kurang beruntung.

Dinamika politik ini tentu saja merupakan simbol masih menguatnya semangat rivalitas antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di tubuh DPR dari total anggota DPR RI 560 orang, pihak KMP menguasai suara yakni 352 orang, sementara KIH menguasai suara 207. Ini merupakan simbol

³⁶ Ibid, 89.

³⁷ Ibid 90.

ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan di tubuh parlemen. Masyarakat sebagai penonton, tentu saja sikap mereka bingung dan ragu antara menerima atau tidak, tapi ini adalah realitas politik.

Fenomena contoh kasus di Indonesia ini, merupakan simbol kewenangan yang melalui prosedur hukum dan perundang-undangan (Pemilu), tapi tidak semua orang Indonesia bersikap menyetujui 100 % atas hasil prosedur tersebut.

Legitimasi

Berdasarkan pengertian legitimasi dapat dibedakan pengertian kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Jika kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, maka kewenangan merupakan hak moral untuk menggunakan sumber-sumber yang membuat dan melaksanakan keputusan politik (hak memerintah). Sedangkan definisi legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.³⁸

Legitimasi memiliki kemiripan dengan kekuasaan dan kewenangan, yakni sama-sama memiliki hubungan atau keterkaitan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara pemerintah dengan rakyat. Karena saling terkait, tentu saja siapapun pemimpin yang memerintah bisa disikapi beragam oleh rakyat yang dipimpinnya. Konsep legitimasi sangat berkaitan erat dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Jika masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik yang mengikat masyarakat, maka kewenangan tersebut dikategorikan sebagai berlegitimasi (sah karena keberadaan pemimpin tersebut telah diterima dan didukung rakyat, walaupun tidak 100 persen).

Obyek Legitimasi

Legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang lain. Yang menjadi objek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang berwenang.

Ramlan Surbakti mengklasifikasi objek legitimasi dalam beberapa pendapat tokoh, antara lain, menurut Easton terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi, ketiga objek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan. Sementara itu, Andrain menyebutkan lima objek, kelima objek legitimasi ini meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Apabila pengertian legitimasi dilihat sebagai dukungan yang diberikan oleh masyarakat, maka kelima objek legitimasi mempunyai hubungan yang kumulatif. Artinya, kalau objek pertama tidak mendapat dukungan maka objek kedua, dan seterusnya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan sifatnya hirarkhis, yakni objek kelima ditentukan objek keempat, demikian seterusnya.

Legitimasi terhadap komunitas politik maksudnya ialah adanya kesediaan para anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok yang berbeda latar belakang untuk hidup secara rukun sebagai komunitas. Apabila masih terdapat berbagai upaya didalam masyarakat baru, maka legitimasi terhadap komunitas politik dapat dikategorikan sebagai legitimasi yang berkadar rendah.

³⁸ Ibid, 92

Demikian pula, jika dukungan terhadap komunitas politik masih rendah, maka berarti dalam masyarakat tersebut terdapat masalah krisis identitas nasionalnya.

Jika masyarakatnya belum memberikan dukungan secara bulat, maka berarti dalam masyarakat ada krisis konstitusi (aturan perundang-undangan). Demikian juga, apabila dukungan terhadap lembaga-lembaga politik masih lemah, maka dalam masyarakat tersebut ada potensi krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan akan terjadi pada masyarakat yang kurang mempercayai para pemimpin politik. Sedangkan apabila masyarakat menilai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan sekelompok kecil (elit), maka hampir dipastikan terjadi krisis kebijakan. Walhasil, kelima objek legitimasi kurang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat.

Kadar Legitimasi

Kadar legitimasi adalah ukuran sikap mengakui dan menerima masyarakat yang dipimpin terhadap orang yang memimpin dalam suatu negara. Kadar legitimasi (keabsahan) pemimpin yang memiliki kewenangan dapat dikelompokkan menjadi empat tipe. Keempat kadar legitimasi (keabsahan) ini meliputi pralegitimasi (belum sah), berlegitimasi (sah atau legal), tak berlegitimasi (tidak sah/tidak legal), dan pascalegitimasi (kondisi pemimpin setelah menjabat).

Kadar pralegitimasi adalah apabila pihak yang akan memerintah sangat yakin bahwa dirinya memiliki hak moral untuk memerintah masyarakat. Artinya, kondisi pemimpin yang mau atau telah dipilih melalui mekanisme pemilihan (Pemilu/lainnya) dan masyarakat bersikap mau menerima dan mengakui seseorang sebagai pemimpin, namun tinggal menunggu diresmikan sebagai pemimpin/pejabat. Contoh, dalam Pilpres 2014, ada Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa (pasangan pertama) dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (pasangan kedua). Sebelum dipilih, mereka sama-sama memiliki kadar pralegitimasi. Demikian pula, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pasca Pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014 lalu, meskipun mereka telah terpilih, namun belum dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan, mereka masih disebut pra-legitimasi (belum sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden), dan oleh karenanya mereka belum memiliki hak moral untuk memerintah.

Pemimpin berlegitimasi adalah pemimpin yang secara resmi diakui dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang dipimpin untuk memerintah dan melaksanakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Sebagai contoh, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikatakan berlegitimasi (sah), jika mereka telah dilakukan prosesi pelantikan dan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2014. Setelah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan, maka mereka telah sah untuk melaksanakan kewenangan yang melekat pada jabatannya dan masyarakat mengakui dan menerima sepenuhnya terhadap apapun program kerja yang telah dikampanyekan di masa pencalonan dan kampanye Presiden.

Pemimpin yang tak berlegitimasi adalah ialah hubungan kewenangan tatkala pihak yang diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah, meskipun pihak yang memerintah (pemimpin) secara terus-menerus mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak kekerasan.

Pemimpin pasca-legitimasi ialah kondisi dasar seorang pemimpin yang telah melewati masa/periode legitimasi (keabsahan) sebagai pemimpin yang didasarkan pada selesainya periode kepemimpinan dan masyarakat tidak mengakui serta tidak menerima atas kepemimpinannya oleh karena kewenangan yang melekat pada jabatannya telah habis. Artinya, legitimasi lama telah habis dan dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan muncul legitimasi baru dengan kewenangan yang baru pula. Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara *de*

facto dianggap pemimpin pasca-legitimasi ketika hadir pemimpin baru yang terpilih, yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pilpres 9 April 2014 lalu. Dari tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014, secara *de jure* masih dianggap berlegitimasi SBY sebagai Presiden, karena menuntaskan masa atau periodisasinya hingga adanya serah terima jabatan dari SBY ke Joko Widodo.

Cara Mendapatkan Legitimasi

Cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu simbolis, prosedural, dan materil. Pertama, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol. Kedua, dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha dan modal memadai. Ketiga, dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Tipologi Legitimasi

Legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural, dan legitimasi instrumental. Pertama, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Kedua, masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ketiga, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharisma maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang seni budaya tertentu. Keempat, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materil (instrumental) kepada masyarakat. Dalam kenyataan para pemimpin pemerintahan tidak hanya menggunakan satu tipe, tetapi juga kombinasi dari dua atau lebih dari kelima tipe itu sesuai dengan struktur dan tingkat perkembangan masyarakatnya.

Pentingnya Memiliki Legitimasi

Memiliki legitimasi itu penting. Ada beberapa argumentasi mengapa legitimasi itu penting bagi pemimpin pemerintahan. *Pertama*, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan dari masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan akan menciptakan pemerintahan yang stabil, sehingga pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki bisa leluasa membuat dan melaksanakan keputusan politik yang mampu mengikat rakyat yang dipimpinnnya. Dengan kekeluasaan tersebut perubahan ke arah yang lebih baik dari visi dan misi pemerintahan akan berjalan dengan sesuai harapan. *Kedua*, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintahan untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Krisis Legitimasi

Dalam setiap suksesi pemerintahan dimanapun pasti ada fenomena krisis legitimasi. Kondisi krisis legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya, perubahan dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Masyarakat semacam ini akan cenderung mempertanyakan setiap kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Apabila pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan aspirasi masyarakat maka sikap mempertanyakan berubah menjadi meragukan keabsahan kewenangan pemerintahan sehingga dukungan kepada pemerintah kian memudar. Pengakuan dan dukungan yang memudar disebut krisis legitimasi.

Ada beberapa alasan mengapa krisis legitimasi terjadi? Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa Lucyan Pye menyebutkan ada empat penyebab terjadinya krisis legitimasi, antara lain *Pertama*, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Contohnya, seperti periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tahun 2009-2014 berakhir, maka pasti beralih pada Presiden Joko Widodo dengan periode 2014-2019, mengingat SBY oleh undang-undang tidak diperkenankan maju kembali pada periode ke-3. Artinya, berbeda Presidennya tapi kewenangannya sama. *Kedua*, persaingan yang sangat tajam dan tak sehat tetapi juga tak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya diantara para pemimpin pemerintahan sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Contohnya, ketika kekuatan di tubuh legislatif/parlemen (DPR) didominasi oleh kekuatan lawan politik pemerintah yang berkuasa dengan *power-full* dan semangat rivalitas yang tinggi, dan di pihak lain, pemerintah yang didukung oleh kekuatan yang minim di parlemen ditambah dengan program kebijakan yang kurang populis, maka persaingan kekuatan dan kekuasaan pasti terjadi. Kalau ini terjadi, ada ancaman potensi konflik antara lembaga negara yang berujung ketidakstabilan pemerintahan. Fenomena ini pernah muncul di Filipina ketika terjadi percobaan kudeta militer berkali-kali terhadap Presiden Macapagal Arroyo beberapa saat yang lalu. *Ketiga*, pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Contohnya, ketika rezim Orde Baru mau berakhir, dimana rakyat mengalami puncak ketidakpercayaan pada rezim orde baru yang otoritarian, tidak demokratis dan penuh KKN, sehingga mengakibatkan revolusi tanpa darah dan menata kembali sistem ketata-negaraan yang lebih reformis dan lebih bermartabat. *Keempat*, sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan. Krisis legitimasi akan semakin gawat manakala pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan dan legitimasi!
2. Apa saja mengapa kewenangan itu penting?
3. Bagaimana cara mendapatkan kewenangan dan legitimasi politik ?
4. Apa saja kadar dan objek legitimasi serta apa pula penyebab terjadinya krisis legitimasi?

Paket 6

PARTAI POLITIK

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada pengetahuan tentang konsep, dinamika serta perkembangan partai politik yang merupakan kelanjutan dari paket 5 sebelumnya. Pembahasan dalam paket ini mencakup definisi partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik dan sistem partai politik. Paket ini merupakan materi inti agar mahasiswa memahami tentang partai politik, dinamika partai politik dalam kehidupan demokrasi serta realitas kehidupan politik yang telah, sedang dan akan terjadi, baik di tingkat lokal Indonesia, regional asia maupun internasional.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh tentang definisi partai politik, sejarah dan dinamika kehidupan partai politik dari waktu ke waktu, serta di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung terhadap tema tentang partai politik ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam menangkap realitas politik khususnya terkait dengan partai politik. Dari konsep dan ilustrasi faktual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang Partai Politik dan dinamika pembahasan tentang kepartaian yang berkembang dalam kehidupan politik.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian partai politik
2. Menjelaskan fungsi partai politik
3. Menjelaskan klasifikasi partai politik
4. Mendeskripsikan sistem kepartaian

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Definisi Partai Politik
2. Fungsi Partai Politik
 - a. Sosialisasi Politik
 - b. Rekrutmen Politik
 - c. Partisipasi Politik
 - d. Pemandu Kepentingan
 - e. Komunikasi Politik
 - f. Pengendalian Konflik
 - g. Kontrol Politik
3. Klasifikasi Partai Politik
 - a. Asas dan Orientasi
 - b. Komposisi dan Fungsi Anggota
 - c. Basis Sosial dan Tujuan
4. Sistem Kepartaian
 - a. Jumlah Partai
 - b. Jarak Ideologi

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan gambar tentang partai politik

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Problem base teaching materi pokok tentang partai politik
2. Memetakan materi pokok tentang partai politik (reading guide)
3. Presentasi hasil membaca

4. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau menyampaikan konfirmasi.
5. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
4. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas membaca materi paket 7 tentang perilaku dan partisipasi politik
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi tentang definisi partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik dan system kepartaian.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan tentang definisi partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik dan system kepartaian.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus

Langkah-langkah kegiatan

1. Mahasiswa secara individual dan random, mengeksplorasi beberapa gambaran tentang definisi partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik dan system kepartaian.
2. Perhatikan gambaran materi powerpoint yang ditayangkan oleh dosen dalam slide melalui tampilan di screen.
3. Berikan respon verbal atas beberapa gambaran tentang kajian partai politik dalam screen.
4. Perhatikan teks tentang konsep partai politik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang ada di screen !

Uraian Materi

PARTAI POLITIK

Definisi Partai Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Syahril Syarbaini dengan mengutip tokoh Neumann (1981) menjelaskan bahwa definisi partai politik merupakan satu organisasi yang bersaing dengan organisasi yang lain, partisipasinya dalam pembuatan keputusan dan kesempatan untuk memobilisasi rakyat untuk bertindak serta memiliki fungsi mengurus kehendak umum, mendidik warga negara bertanggung jawab, menjadi penghubung pemerintah dengan rakyat serta memilih pemimpin. Sementara Carl Frederich mendefinisikan bahwa partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan ide kepada seluruh anggotanya.³⁹

Sedangkan Soltau mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.⁴⁰ Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁴¹

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, yakni UU nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pemikiran para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisir secara sistematis, stabil, transparan dan akuntabel yang dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum yang jujur, adil dan bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai program kebijakan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara tanpa ada paksaan, kekerasan serta eksploitasi dan diskriminasi.

Tujuan Partai Politik

Organisasi apapun pasti memiliki tujuan, tak terkecuali partai politik. Tujuan tersebut akan menjadi penuntun serta pedoman ketika organisasi tersebut berjalan. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut, sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut dapat membuahkan hasil yang sempurna. Begitu pula dengan partai politik yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan.

³⁹ Syarbaini, Syahril, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 131.

⁴⁰ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 116.

⁴¹ Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 160-161.

Tujuan utama partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan dan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Dalam upaya mencari, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan, tentu ada hal yang sama dalam tujuan dari masing-masing partai politik, yakni kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat yang akan dipimpin. Siapapun pemimpinnya dan darimanapun asal-muasal partai politiknya, tentu memiliki tujuan utama seperti dimaksud. Namun demikian, untuk meraih tujuan tersebut, adakalanya melalui dinamika dan seni berpolitik yang bervariasi, tergantung pada mainstream (arus utama) elit politik yang berkembang.

Setiap organisasi apapun pasti memiliki tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut akan menjadi penuntun serta pedoman ketika organisasi tersebut berjalan. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut, sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut dapat membuahkan hasil yang sempurna. Begitu pula dengan partai politik yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan.

Fungsi Partai Politik

Parpol sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilih partai politik tersebut pada pemilihan umum. Sosialisasi politik ini bagian dari pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh : penyampaian program-program politik parpol pada acara kampanye menjelang Pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar Aksi Simulasi Pengenalan Partai Politik



Sosialisasi Undang-undang Partai Politik

Parpol sebagai sarana komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan an menetapkan suatu kebijakan).

Contoh : ketika ada persoalan kebangsaan terkait kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro-kontra (semisal kenaikan BBM, tarif dasar listrik (TDL, kenaikan upah minimum regional (UMR)), maka partai politik bisa mengambil peran untuk saling membuka diri untuk melakukan komunikasi antar parpol atau parpol dengan pemerintah, seperti dalam berikut ini :



Gambar ini adalah komunikasi politik antara SBY sebagai Presiden dengan ibu Megawati terkait isu kenaikan BBM dan TDL di Jakarta



Gambar Deklarasi Komitmen Anti Korupsi

Parpol sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai organisasi politik, tentu menginginkan agar partainya besar dan berkembang. Partai politik yang ingin berkembang, tentu saja melakukan berbagai upaya untuk melakukan rekrutmen politik kepada seluruh anggota yang memiliki ideologi serta visi dan misi yang sama dengan partai politik tersebut. Terkait dengan tujuan tersebut, maka suatu keharusan bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen anggota sebanyak-banyaknya tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan internal masing-masing partai pengusung.

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Dengan kata lain, rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contoh dari rekrutmen politik ini adalah ketika pimpinan partai politik melakukan safari politik ke pesantren-pesantren untuk mendapatkan dukungan agar partai yang dibawa oleh pimpinan partai tersebut bisa diterima dan diakui serta didukung sepenuhnya oleh tokoh yang dikunjungi. Jika tokoh yang dikunjungi pimpinan partai tersebut menyetujui masuk dalam struktur kepemimpinan partai, maka secara otomatis simpatisan dan masyarakat pengikut tokoh tersebut ikut mendukung keberadaan partai politik tersebut. Hal ini tercermin dalam gambar berikut :



Parpol sebagai Sarana Pengendalian Konflik

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, tentu saja setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik menjadi sesuatu yang tak terelakkan pasti terjadi. Konflik yang dimaksud dalam konteks ini adalah terkait dengan perbedaan pendapat, pertentangan konsep dan pemikiran hingga adu fisik antar individu atau kelompok yang terkait dengan kepentingan politik. Dalam konteks inilah, maka kehadiran partai politik menjadi sarana paling efektif untuk mengendalikan dan mengeleminasi konflik tersebut.

Dalam pandangan Ramlan Surbakti, partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik dengan cara berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik tersebut, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat konflik tersebut serta membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.⁴²

Contoh konkret : Ketika pemerintah menggulirkan kebijakan kenaikan harga BBM, maka hampir seluruh lapisan masyarakat khususnya yang terkena dampak, menolak kebijakan tersebut dengan aksi turun jalan bersama seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa. Ini sebagai wujud ekspresi masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali konflik dengan cara membuka ruang dialog dan berusaha menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.



⁴² Ibid, 121.



Parpol Sebagai Kontrol Politik

Terkait dengan parpol sebagai kontrol politik ini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tentu saja, dalam melakukan kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

Tujuan kontrol politik oleh partai politik ini dimaksudkan untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru, sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol politik dari parpol ini merupakan mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus-menerus.

Sebagai contoh,



Gambar Aksi Mahasiswa Menduduki Gedung DPR RI saat Reformasi 1998



Gambar simbol protes atas kenaikan BBM

Tipologi Partai Politik

Partai politik memiliki tipologi yang terklasifikasi sesuai kriteria tertentu. Tipologinya antara lain, asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Secara rinci tipologi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Asas dan Orientasi

Setiap partai politik pasti dalam pendiriannya memiliki asas dan orientasi sebagai landasan dan tujuan partai tersebut diadakan. Berdasarkan asas dan orientasi ini, partai politik memiliki tiga kategori, yakni partai politik pragmatis, partai politik doktriner dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang memiliki program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung program-programnya disusun untuk kepentingan pemimpin utamanya, termasuk gaya kepemimpinan sang pemimpin.

Sedangkan partai politik doktriner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkrit dan sistematis dalam bentuk program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai politik. Dalam parpol doktriner ini berubahnya kepemimpinan tidak berarti berubahnya prinsip dan program kegiatan kepartaian.

Partai politik kepentingan adalah suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama atau soal lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Parpol seperti sering dijumpai dalam sebuah yang menganut sistem multi partai.

Komposisi dan Fungsi Partai

Menurut komposisi dan fungsi anggota, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga Pemilu dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, dan masyarakat juga dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan dari berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna

memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang bersifat sangat umum. Kelemahan partai tampak pada saat pembagian kursi atau jabatan dan perumusan kebijakan, karena karakter kepentingan setiap kelompok dan aliran akan sangat menonjol. Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai. Partai seperti ini umumnya terdapat pada negara-negara berkembang yang menghadapi permasalahan integrasi nasional. contohnya adalah Partai Barisan Nasional di Malaysia yang merupakan koalisi antara kelompok Melayu, China dan India.

Sedangkan partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hierarkhis, sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya demikian, partai kader seringkali disebut sebagai partai yang sangat elitis. Contohnya, partai NAZI di Jerman dan Partai Komunis dimanapun.

Basis Sosial dan Tujuan

Tokoh politik Gabriel Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosial, partai politik dibagi menjadi empat tipe, antara lain :

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik, Protestan dan Hindu.
4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. **Maurice Duverger** menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multipartai.

Jumlah Partai

Sistem kepartaian dapat digolongkan berdasarkan jumlah partai, yaitu partai tunggal (totaliter, otoriter dan dominan), sistem dua partai dominan dan bersaing, dan sistem multipartai. Partai tunggal totaliter biasanya merupakan partai doktriner dan diterapkan di negara-negara komunis dan fasis. Bentuk partai tunggal otoriter adalah suatu sistem kepartaian yang didalamnya terdapat lebih dari satu partai, tetapi terdapat satu partai besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat memobilisasi masyarakat dan mengesahkan kekuasaannya, sedangkan partai-partai kurang menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi oleh penguasa. Apabila dalam bentuk partai tunggal totaliter, partailah yang menguasai pemerintahan dan militer, maka dalam bentuk partai tunggal otoriter pemerintah dan militer yang menguasai partai. Contoh partai otoriter adalah Partai Uni Nasional Afrika Tanzania (UNAT) dan Partai Aksi Rakyat Singapura.

Bentuk partai tunggal dominan, tetapi demokratis adalah suatu sistem kepartaian yang didalamnya terdapat lebih dari satu partai, namun satu partai saja yang dominan. Sedangkan partai-partai yang lain tidak mampu menyaingi partai yang dominan, walaupun ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan melalui Pemilu. Partai dominan biasanya sudah berakar dalam masyarakat dan organisasinya sudah melembaga, ketika partai-partai oposisi muncul. Contoh partai dominan tetapi demokratis adalah Partai Liberal Demokrat di Jepang.

Sistem dua partai bersaing merupakan suatu sistem kepartaian yang didalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan memerintah melalui pemilihan umum. Dalam sistem dua partai, terdapat pembagian tugas, yaitu partai pemenang Pemilu menjadi partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah berperan sebagai kekuatan oposisi yang loyal. Sebagai partai yang kalah dalam Pemilu, ia tetap melakukan kontrol atas partai yang menang dalam Pemilu, akan tetapi partai yang kalah tetap loyal terhadap sistem politik. Contohnya di Amerika Serikat Presiden dari Partai Demokrat dan kongres berasal dari Partai Republik. Di Australia ada partai liberal dan partai buruh.

Sistem multi partai adalah merupakan suatu sistem yang terdiri lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun sosial ekonomi. Karena banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui Pemilu, maka yang sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih partai yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Tidak jarang untuk mencapai konsensus diantara partai-partai tersebut dilakukan "praktik dagang sapi", yaitu tawar-menawar dalam hal program dan kedudukan menteri. Dalam sistem ini lembaga legislatif atau parlemen lebih kuat daripada lembaga eksekutif, karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya, jika sistem pemerintahan adalah parlementer. Contohnya antara lain Belanda, Perancis, Jerman dan Itali.

Untuk uraian dinamika kepartaian sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1955

**Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan
Partai Politik. Empat partai terbesar
diantaranya adalah :**

PARPOL	SUARA	%	KURSI
PNI	8.434.653	22,3	57
MASYUMI	7.903.886	20,9	57
NU	6.955.141	18,4	45
PKI	6.176.914	16,4	39

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TH 1971



Pemilu Th 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:

1. Partai Katolik
2. Partai Syarikat Islam Indonesia
3. Partai Nahdlatul Ulama
4. Partai Muslimim Indonesia
5. Golongan Karya
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
8. Partai Nasional Indonesia
9. Partai Islam PERTI
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI ERA ORDE BARU



Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1999



- | | |
|--|---|
| 1. Partai Indonesia Baru | 25. Partai Nahdlatul Ummat |
| 2. Partai Kristen Indonesia | 26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis |
| 3. Partai Nasional Indonesia - Jajawa | 27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia |
| 4. Partai Al-Islami Demokrat Indonesia | 28. Partai Republik |
| 5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia | 29. Partai Islam Demokrat |
| 6. Partai Ummat Islam | 30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen |
| 7. Partai Kesatuan Ummat | 31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak |
| 8. Partai Masyarakat Kita | 32. Partai Demokrasi Indonesia |
| 9. Partai Persatuan Pembangunan | 33. Partai Golongan Karya |
| 10. Partai Serikat Islam Indonesia | 34. Partai Persatuan |
| 11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 35. Partai Kebangkitan Bangsa |
| 12. Partai Aksi Utama | 36. Partai Uni Demokrasi Indonesia |
| 13. Partai Kebangkitan Masyarakat | 37. Partai Buruh Nasional |
| 14. Partai Sarikat Islam Indonesia | 38. Partai Rakyat untuk Kemerdekaan Geger Ronggo |
| 15. Partai Amanat Nasional | 39. Partai Karya Rakyat |
| 16. Partai Rakyat Demokratik | 40. Partai Cinta Bangsa |
| 17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1904 | 41. Partai Pendidikan dan Persatuan |
| 18. Partai Katolik Demokrat | 42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia |
| 19. Partai Pilihan Rakyat | 43. Partai Nasional Bangsa Indonesia |
| 20. Partai Rakyat Indonesia | 44. Partai Bhayusa Tunggal Ika Indonesia |
| 21. Partai Politik Islam Indonesia - Maswani | 45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia |
| 22. Partai Bulan Bintang | 46. Partai Nasional Demokrat |
| 23. Partai Solidaritas Bangsa | 47. Partai Ummat Muslimin Indonesia |
| 24. Partai Persatuan | 48. Partai Karya Indonesia |

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004



1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009



1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Barisan Nasional (Barnas)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
8. Partai Kondillon Sejahtera (PKS)
9. Partai Amanat Nasional (PAN)
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17. Partai Karya Perjuangan (PKP)
18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
21. Partai Republik Nusantara (Republihan)
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya (Golkar)
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)
26. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
27. Partai Bulan Bintang (PBB)
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34. Partai Kebangkitan Nasional Utama (PKNU)
35. Partai Merdeka
36. Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia (PPNU)
37. Partai Sarikat Indonesia (PSI)
38. Partai Buruh



PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2009

1. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)
2. Partai Daulat Aceh (PDA)
3. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
4. Partai Rakyat Aceh (PRA)
5. Partai Aceh (PA)
6. Partai Bersatu Aceh (PBA)

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU NASIONAL 2014



1. Nasional Demokrat (Nasdem)	: Surya Patoh (Owner Metro TV)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: Muhammadiyah Iskandar
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	: Anis Matta
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	: Diah Permata Mogawati Setiawati Soekamo Putri
5. Partai Golkar (PG)	: Abu Rizal Bakrie (Owner TV One)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GorIndra)	: Suhardi
7. Partai Demokrat (PD)	: Susilo Bambang Yudhoyono
8. Partai Amanat Nasional (PAN)	: Hatta Radjasa
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: Surya Dharma Ali
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	: Wiranto (Hati Tanoo MNC TV, Global TV, RCTI, dll)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)	: MS. Ka'ban
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	: Sutiyoso

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LOKAL NAD 2014



1. Partai Damai Aceh (PDA)	: Tgk. Muhibbussabri A. Wahab
2. Partai Nasional Aceh (PNA)	: Irwansyah (Tgk. Muchsalmina)
3. Partai Aceh (PA)	: Muzakir Manaf

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan dengan baik dan sistematis tentang pengertian serta dinamika partai politik yang saudara tangkap dalam kehidupan perpolitikan!
2. Jelaskan dengan sistematis tentang apa saja fungsi partai politik!
3. Jelaskan dengan baik tentang klasifikasi dan system kepartaian

Paket 7
PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada pengetahuan tentang konsep, dinamika serta realitas perilaku dan partisipasi politik yang merupakan kelanjutan dari paket sebelumnya. Pembahasan mencakup pengertian perilaku politik, model-model politik, pemimpin politik, pengertian partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, model partisipasi politik, dan perilaku memilih. Paket ini merupakan materi awal agar mahasiswa memahami teori serta realitas kehidupan politik yang telah, sedang dan akan terjadi, baik di tingkat lokal Indonesia, regional Asia maupun internasional.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh tentang perilaku dan partisipasi politik dalam Pemilu yang ada di Indonesia secara *artificial* (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang *faktual* (seperti cuplikan atau gambar-gambar tentang perilaku dan partisipasi politik). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema perilaku dan partisipasi politik ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam menangkap realitas politik khususnya terkait dengan perilaku dan partisipasi politik. Dari konsep dan ilustrasi faktual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang Perilaku dan Partisipasi Politik

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian perilaku politik
2. Menjelaskan perilaku dan partisipasi politik dari pemimpin politik
3. Menjelaskan pengertian partisipasi politik
4. Mendeskripsikan tipologi partisipasi politik
5. Menjelaskan tentang model-model partisipasi politik, dan.
6. Menjelaskan tentang perilaku pemilih

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

- a. Pengertian perilaku Politik
- b. Model-model politik
- c. Pemimpin politik
- d. Pengertian Partisipasi politik
- e. Tipologi partisipasi politik
- f. Model partisipasi politik
- g. Perilaku memilih

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan gambar tentang perilaku dan partisipasi politik

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Problem base teaching materi pokok tentang perilaku dan partisipasi politik
2. Memetakan materi pokok perilaku dan partisipasi politik (reading guide)
3. Presentasi hasil membaca
4. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau menyampaikan konfirmasi.
5. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

4. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas membaca materi paket 8 tentang model-model politik
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi praktik perilaku dan partisipasi politik yang mereka temui dalam kehidupan politik di Indonesia.

Tujuan

Mahasiswa dapat melakukan menggambarkan perilaku dan partisipasi politik yang mereka jumpai dalam kehidupan politik di Indonesia.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus

Langkah-langkah kegiatan

1. Mahasiswa secara individual dan random, eksplorasi beberapa gambaran perilaku dan partisipasi politik yang pernah anda temui.
2. Perhatikan gambaran perilaku dan partisipasi politik yang ada dalam slide di screen.
3. Berikan respon verbal atas beberapa gambar tentang perilaku dan partisipasi politik yang ditampilkan dalam screen.
4. Perhatikan teks tentang konsep perilaku dan partisipasi politik yang ada screen !

Uraian Materi

PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK

Pengertian Perilaku Politik

Pengertian Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan perilaku politik adalah pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan perilaku politik terbagi menjadi dua bagian, antara lain :

1. Pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan melalui suprastruktur yang terbentuk (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah/Kades)
2. Masyarakat menjalankan fungsi politik sebagai masyarakat melalui infrastruktur politik (MPR RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Tk.1, DPRD Tk.2)

Realitasnya, suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan kewenangan) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan toleransi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengamalan di masa lalu) individu yang membuat keputusan politik.

Pada sistem politik yang mantap, mungkin lembaga yang lebih menonjol daripada kepribadian individu. Sedangkan dalam konteks tertentu seperti membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, mungkin kepribadian individu yang lebih menonjol daripada lembaga.

Mengenai siapa yang melakukan kegiatan politik, ada dua pandangan yang membahas hal tersebut, antara lain, *pertama*, pendekatan kelembagaan yang beranggapan bahwa lembaga (struktur) yang melakukan kegiatan politik, sedangkan individu sebagai pelaksana. *Kedua*, pendekatan behavioralisme yang menyatakan bahwa individu yang melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik merupakan perilaku individu yang berpola tertentu.

Model Perilaku Politik

Dalam mengkaji perilaku politik ada tiga analisis yaitu:

- a. Individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik antara lain, *pertama*, lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa). *Kedua*, lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor (keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan). *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. *Keempat*, faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung (cuaca, keadaan keluarga, suasana kelompok, dan lain-lain).
- b. Agregasi politik adalah individu aktor politik secara kolektif (kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga pemerintahan dan bangsa).
- c. Tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat.

Pemimpin Politik

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi dan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif serta kepemimpinan lebih menekankan

pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Kepemimpinan juga berbeda dengan elit politik, menurut Pareto, elit adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti prestise, kekayaan ataupun kewenangan.

Kategori kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu

a. Proses kepemimpinan dan karakter pemimpin

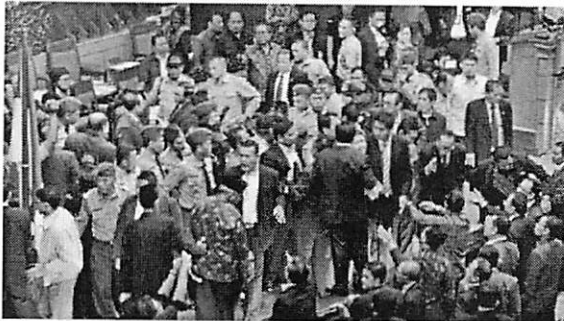
Proses kepemimpinan artinya kepemimpinan demokrasi yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Sedangkan karakter politik, dibagi menjadi empat yaitu pasif-positif, aktif-negatif, pasif-negatif dan aktif-positif.

b. Hasil proses kepemimpinan dibagi menjadi dua yaitu ekstrimis (berupaya mengubah semua rezim lama dengan rezim baru, sangat disiplin dan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan), sedangkan moderat (masih mempertahankan rezim lama, tapi disesuaikan dengan rezim baru, tidak terlalu disiplin, lebih menggunakan dialog daripada kekerasan dalam mencapai tujuan).

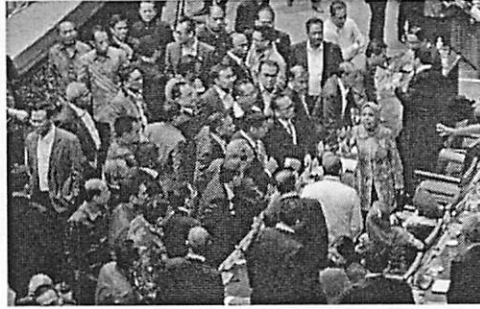
c. Sumber kekuasaan dibagi tiga, yaitu kepemimpinan rasional (bersumber kewenangan legal, legalitas pola-pola peraturan normatif, hak orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah), kepemimpinan tradisional (berdasarkan pada kepercayaan, tradisi, legitimasi orang yang memiliki kewenangan berdasarkan tradisi yang dianggap keramat), kepemimpinan kharismatik (berdasarkan kekaguman masyarakat atas kelebihan yang dimilikinya).

Berdasarkan motif dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan, menurut **Niccolo Machiavelli** ada dua tipe kepemimpinan yaitu pemimpin tipe rubah (*foxes*) dan pemimpin tipe singa (*lions*). Berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, menurut **Burns** ada dua tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformatif.

Beberapa contoh gambar perilaku politik, antara lain :



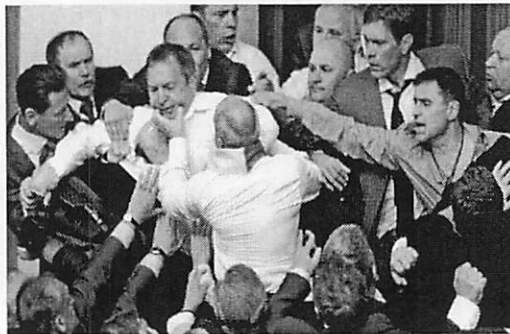
Ricuh Antar Anggota DPR RI dalam agenda Pemilihan Pimpinan DPR 2014-2019 (02-10-2014). Gambar ini diakses melalui alamat : <http://sinarharapan.co/news/read/141003022/ricuh-saat-sidang-paripurna-perburuk-citra-dpr> pada tgl 05 Oktober 2014)



Kericuhan antar anggota DPR RI soal pengesahan UU Pilkada pada hari Kamis, 25 September 2014
Gambar diakses melalui : <http://analisadaily.com/news/read/priyo-santoso-jika-kecewa-silakan-ajukan-gugatan-hukum/67838/2014/09/27> (data diambil pada tgl 28 September 2014).



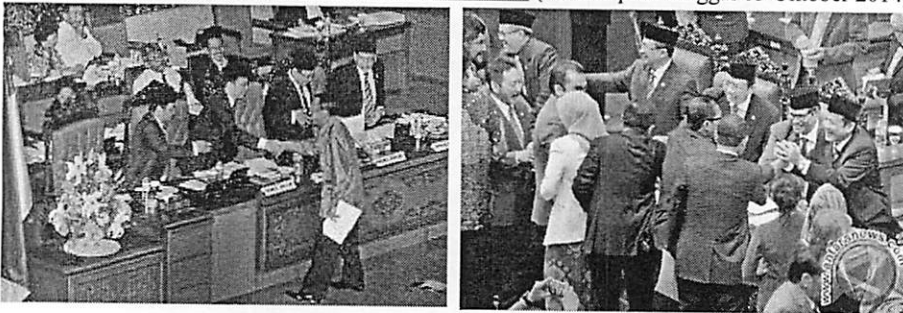
Perilaku politik anggota DPR RI yang sedang tidur dalam sidang paripurna DPR RI
Gambar ini diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 melalui <http://alfido.com/2014/10/01/kerja-nggak-becus-gaji-anggota-dpr-malah-naik-rp-134-juta/>



Adu Jotos antara anggota DPR di negara Ukraina pada tanggal 13 Desember 2012 diakses melalui <http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/13/aktivis-perempuan-bugil-demo-anggota-parlemen-adu-jotos-357484> (diakses 05 Oktober 2014)



Adu Jotos DPR di Turki soal reformasi RUU Pendidikan pada tanggal 13 Januari 2014. Gambar ini diakses melalui <http://www.kaskus.co.id/thread/52d3526bbeb17f3298b45ce/anggota-parlemen-turki-adu-jotos-kirain-di-indonesia-doank/> (diakses pada tanggal 05 Oktober 2014)



Suasana Sidang Paripurna Terakhir tanggal 30 September 2014
Gambar diakses <http://www.antaranews.com/foto/73249/sidang-paripurna-dpr-terakhir> (diakses pada tanggal 05 Oktober 2014)

Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.⁴³ Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

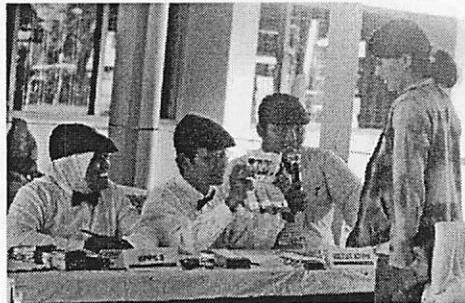
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Rambu-rambu dalam partisipasi politik yaitu *pertama*, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. *Kedua*, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah tetap termasuk dalam partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan sesuai prosedur yang wajar maupun kekerasan. *Keenam*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan atas kesadaran sendiri maupun atas desakan.

⁴³ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10

Berikut beberapa ilustrasi gambar terkait dengan partisipasi politik warga negara :



Gambar partisipasi warga dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014



Gambar petugas KPPS melayani warga dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014



Aksi Demo antara pro dengan yang kontra Undang-undang Pilkada tidak langsung

Tipologi Partisipasi Politik

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi politik aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output, sedangkan partisipasi pasif hanya berorientasi pada proses output.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu :

- a. Apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator yaitu orang yang setidaknya pernah ikut pemilihan umum.
- c. Gladiator yaitu orang yang terlibat aktif dalam proses politik, misalnya, aktivis partai dan pekerja kampanye, komunikator dan aktivis masyarakat
- d. Pengkritik yaitu dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Sedangkan menurut **Olsen**, membagi partisipasi menjadi enam lapisan yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator, warga Negara, marginal, dan orang yang terisolasi. Partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku ada individual yakni seseorang yang menulis surat berisi keluhan dan tuntutan kepada pemerintah atau kolektif, sedangkan kolektif adalah kegiatan warga Negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif dibagi menjadi dua yaitu partisipasi kolektif yang konvensional (pemilu), dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional atau agresif (aksi mogok, huru hara, dan lain-lain). Secara agresif partisipasi dibagi lagi menjadi dua yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah.⁴⁴

Model Partisipasi Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik ialah kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dan kepercayaan kepada pemerintah, yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Berdasarkan tinggi-rendahnya partisipasi politik, **Paige** membagi menjadi empat tipe, yakni :

- a. Aktif, jika seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.
- b. Apatis, jika seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah.
- c. Militan radikal, kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah.
- d. Pasif, kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi.

Perilaku Memilih

Terdapat beberapa pendekatan untuk menjelaskan mengapa seseorang memilih atau tidak memilih, antara lain yaitu :

1. Pendekatan struktural, yaitu dengan melihat bahwa kegiatan memilih sebagai hasil dari konteks struktur yang luas seperti struktur sosial, sistem sosial, sistem pemilu, permasalahan, dan program yang ditunjukkan oleh setiap partai.
2. Pendekatan sosiologis, kegiatan memilih karena konteks sosial yaitu dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.
3. Pendekatan ekologis, yakni kegiatan memilih seseorang dipengaruhi oleh perbedaan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, kelompok masyarakat seperti ras, suku, dan lain-lain.
4. Pendekatan psikologis, yaitu seseorang memilih karena partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya maka partai tersebut yang akan ia pilih tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Pendekatan rasional, kegiatan memilih mempertimbangkan untung rugi memilih seorang kandidat.

Keempat pendekatan tersebut beranggapan bahwa kegiatan memilih merupakan kegiatan otonom individu dalam artian tanpa desakan dari pihak lain, namun dalam kenyataan pemilih memilih karena

⁴⁴ Surbakti. Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 143.

ada paksaan dari pihak lain (kepala adat, pemuka agama, patron-klien, pejabat pemerintah, polisi) yang dalam mempengaruhi tidak selalu berupa persuasi tetapi kadang berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan.

Untuk uraian sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan dengan baik dan sistematis tentang pengertian serta dinamika perilaku politik yang sandara tangkap dalam kehidupan perpolitikan!
2. Jelaskan dengan sistematis tentang pengertian, tipologi serta model-model partisipasi politik !
3. Jelaskan dengan baik tentang perilaku pemilih

Paket 8

MODEL-MODEL SISTEM POLITIK

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada pengetahuan tentang model-model sistem politik yang berkembang dalam dinamika politik di negara-negara di dunia, dimana materi ini merupakan kelanjutan dari paket 7 sebelumnya. Pembahasan dalam paket ini mencakup beberapa model sistem politik yang pernah ada di dunia, antara lain sistem politik otokrasi tradisional, model sistem politik totaliter, model sistem politik demokrasi dan model sistem politik di negara-negara berkembang. Paket ini merupakan materi inti agar mahasiswa memahami tentang model-model sistem politik yang berkembang di berbagai belahan dunia, baik di benua Asia, Afrika, Amerika dan Eropa.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh tentang beberapa model sistem politik yang antara lain, sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, sistem politik demokratis dan sistem politik di negara berkembang dengan berbagai contoh konkret negara mana yang masuk kategori sistem politik yang ada dengan mempertimbangkan selama relevan dan mendukung terhadap tema tentang partai politik ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam menangkap model-model sistem politik yang berkembang hingga saat ini. Dari konsep dan ilustrasi faktual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang model-model sistem politik yang berkembang dalam kehidupan politik di berbagai negara di dunia.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan sistem politik otokrasi tradisional
2. Menjelaskan sistem politik totaliter
3. Menjelaskan sistem politik demokratis
4. Mendeskripsikan sistem politik di negara-negara berkembang

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional
2. Sistem Politik Totaliter
3. Sistem Politik Demokrasi
4. Sistem Politik di Negara Berkembang

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan gambar tentang model-model sistem politik

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Problem base teaching materi pokok tentang partai politik
2. Memetakan materi pokok tentang partai politik (reading guide)
3. Presentasi hasil membaca
4. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau menyampaikan konfirmasi.
5. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
4. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas membaca materi paket 9 tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi tentang model-model sistem politik yang terdiri dari sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, sistem politik demokratis dan sistem politik di negara berkembang.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan tentang sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, sistem politik demokratis dan sistem politik di negara berkembang.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus

Langkah-langkah kegiatan

1. Mahasiswa secara individual dan random, mengeksplorasi beberapa gambaran tentang model-model sistem politik
2. Perhatikan gambaran materi powerpoint yang ditayangkan oleh dosen dalam slide melalui tampilan di screen.
3. Berikan respon verbal atas beberapa gambaran tentang kajian model-model sistem politik dalam screen.
4. Perhatikan teks tentang berbagai sistem politik dalam kehidupan bernegara di berbagai negara di dunia sebagaimana yang ada di screen !

Uraian Materi

MODEL-MODEL SISTEM POLITIK

Pendahuluan

Konsep “sistem” oleh sarjana ilmu politik diadopsi dari ilmu biologi. Dianggap bahwa sebagai suatu sistem politik, seperti halnya organisme biologi yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Keseluruhan dari sistem itu harus diteliti jika seluruh organisme ingin dimengerti. Sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara.

Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan.

Secara etimologis, sistem berasal dari dua kata yaitu sistem dan politik. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “sistema” yang berarti :

- a. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian
- b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Sistem dapat pula diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Sistem dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila satu bagian rusak dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang dicapai tidak dapat dipenuhi atau sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

Setiap sistem memiliki sifat yaitu :

1. Terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen
2. Bagian-bagian atau komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan saling tergantung.
3. Sistem memiliki *boundaries* yang memisahkannya dengan lingkungannya yang terdiri dari sistem-sistem lain.

Konsep sistem politik sering digunakan untuk menggantikan kata negara dalam penerapannya mencoba mendasarkan studi tentang fenomena-fenomena politik dalam konteks perilaku politik dalam masyarakat. Perilaku politik dianggap sebagai bagian dari keseluruhan perilaku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai macam proses dan salah satunya adalah sistem politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya.

Dalam konsep sistem politik kita temukan istilah-istilah :

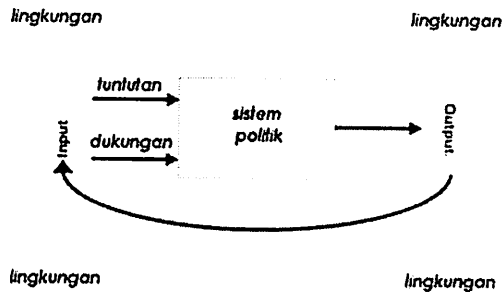
1. Proses politik adalah masuknya input berupa tuntutan dan dukungan ke dalam sistem politik yang kemudian berubah menjadi output (keputusan/kebijaksanaan).
2. Struktur politik terdiri dari infrastruktur politik (politik informal) dan suprastruktur politik (politik formal).
3. Fungsi politik terdiri dari fungsi input meliputi sosialisasi, rekrutmen, komunikasi, artikulasi, dan agregasi ; dan fungsi output meliputi pembuatan, pelaksana dan penghakiman kebijaksanaan).

Menurut Easton sistem politik terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. The political system allocates values (bagian dari sistem sosial yang merupakan alokasi daripada nilai-nilai);
2. Its allocations are authoritative (pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan);
3. Authoritative allocations are binding on the society as a work (pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai satu keseluruhan).

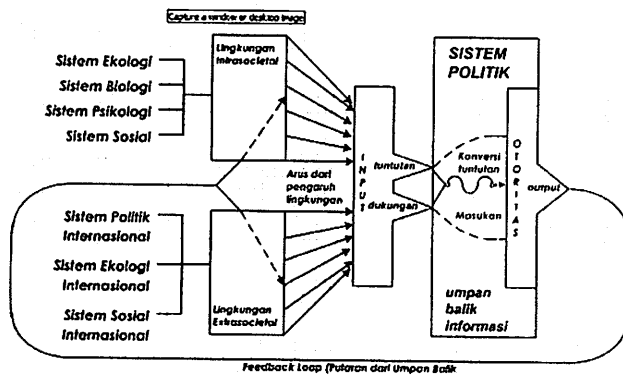
Batasan yang dikemukakan oleh Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai satu keseluruhan. David Easton menggambarkan skema kerja system politik sebagai berikut :

Skema Kerja Sistem Politik menurut David Easton



Bagan Pola Pikir Easton terhadap Pengaruh Lingkungan

Model Arus Sistem Politik



Sedangkan menurut Robert A. Dahl, sistem politik adalah sebagian pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.

Gabriel Almond mengemukakan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang terjadi di dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan fungsi adaptasi. Dari

pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa dalam masyarakat yang tidak atau belum merdeka tidak terdapat sistem politik dari masyarakat tersebut, yang ada adalah sistem politik dari masyarakat atau negara yang menguasainya. Lebih lanjut Almond menyatakan bahwa sistem politik itu menjalankan fungsi integrasi yakni mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat bersangkutan, dan fungsi adaptasi merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungannya.

Menurut Gabriel Almond, sistem politik antara lain adalah merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi penyatuan dan penyesuaian.

Sistem politik terdiri dari berbagai subsistem seperti misalnya sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem pemilihan kepala daerah, sistem budaya politik, dan sistem peradaban lainnya.

Budaya politik merupakan satu komponen dalam sistem politik. Komponen sistem politik lainnya adalah struktur politik. Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik, yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik, atau yang memberi arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.

Ada dua tingkat orientasi politik, yaitu di tingkat masyarakat dan di tingkat individu. Orientasi individu terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif. Didalam realitas kehidupan, ketiga aspek itu merupakan satu kesatuan.

Aspek budaya politik lainnya adalah pandangan atau sikap sesama warga negara. Sikap ini berkaitan dengan "rasa percaya" (*trust*) dan "permusuhan" (*hostility*). Adanya sikap saling percaya menumbuhkan kerja sama, sedangkan konflik bisa terjadi manakala diantara berbagai pihak dalam masyarakat ada hubungan saling bermusuhan.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengklasifikasi budaya politik ke dalam tiga tipe, yaitu: budaya politik parokial, budaya politik subjek dan budaya politik partisipan. Afan Gaffar menyebut tiga ciri budaya politik Indonesia yang dominan, yaitu hirarki yang ketat, kecenderungan *patronage*, dan kecenderungan neo-patrimonialistik.

Model politik yang akan diuraikan ini lebih dilihat dari sudut historis dan perkembangan sistem politik, dimulai dari otokrasi tradisional ke totaliter dan sampai pada demokrasi. Diantara ketiga model sistem politik ini terdapat berbagai sistem politik yang timbul karena disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat setempat maupun yang timbul sebagai kombinasi unsur-unsur terbaik dari ketiga sistem politik tersebut.

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa hal yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut, antara lain yaitu :

1. Sistem interaksi bahwa dalam sistem politik terjadi interaksi atau hubungan antara aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik yang berinteraksi dapat berwujud individu-individu, sekelompok individu, organisasi, ataupun lembaga atau instansi.
2. Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Maksudnya nilai-nilai merupakan sesuatu hal yang mempunyai harga yang tinggi di mata masyarakat. Perbedaan penghargaan terhadap suatu nilai pada hakekatnya disebabkan oleh perbedaan kebutuhan dari masing-masing masyarakat.
3. Paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah, artinya paksaan sedikit banyak bersifat sah apabila dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa paksaan fisik yang dilakukan dalam suatu sistem politik keabsahannya diragukan.

Ciri-ciri Sistem Politik

Menurut **Gabriel Almond** , sistem politik modern maupun primitif bersifat memiliki ciri-ciri khusus, antara lain :

1. Bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhanaupun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik.
2. Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda yang disebabkan oleh karena perbedaan struktur.
3. Mempunyai sifat multi fungsional dalam artian menjalankan beberapa atau banyak fungsi.
4. Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern, dan dalam pengertian yang tradisional tidak semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat hanya bersifat relatif saja dan keduanya bercampur satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Easton ciri-ciri sistem politik yaitu :

1. Ciri-ciri Identifikasi

Untuk membedakan suatu sistem politik dari sistem-sistem sosial lainnya, maka harus bisa mengidentifikasi dengan menggambarkan unit-unit dari unit-unit yang berada di luar sistem politik itu :

a. Unit Sistem Politik.

Unit sistem politik merupakan elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Elemen-elemen utama sistem politik adalah tindakan-tindakan politik.

b. Batas-batas Sistem Politik.

Batas suatu sistem politik dapat dinyatakan dengan semua tindakan atau aktivitas yang sedikit banyak berhubungan secara langsung dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; setiap tindakan atau aktivitas sosial yang tidak mengandung ciri-ciri tersebut akan dikeluarkan dari sistem politik dan dengan demikian secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal dalam lingkungan.

2. Input dan Output.

Sistem politik tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan-keputusan dan otoritatif. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang dinamakan output. Sistem politik harus mempunyai input yang terus-menerus untuk dapat tetap berlangsung. Input adalah masukan atau energi bagi bekerjanya suatu sistem politik. Dengan demikian mempelajari sistem politik adalah mengidentifikasi proses bagaimana input-input ditransformasikan (diubah) menjadi output-output, mengidentifikasi bagaimana proses-proses itu terus dipelihara dan berjalan, dan mengetahui hubungan antara input dan output.

3. Diferensiasi Suatu Sistem.

Lingkungan memberikan energi untuk mengaktifkan suatu sistem, dan informasi tentang arah penggunaan energi tersebut. Dengan cara ini suatu sistem dapat bekerja. Sistem politik mengubah input menjadi output (kebijakan). Unit-unit pembentuk sistem itu memiliki pembagian tugas agar tidak menjalankan fungsi yang sama dalam waktu yang sama. Artinya ada pembagian tugas.

4. Integrasi dalam Suatu Sistem.

Suatu sistem terstruktur ingin mempertahankan dirinya sendiri, maka sistem itu harus memiliki mekanisme yang mengintegrasikan atau merangsang anggota-anggotanya untuk

bekerjasama walaupun dalam kadar minimal, sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif.

Mekanisme Sistem Politik

Suatu sistem politik bekerja apabila adanya input-input yang berupa tuntutan dan dukungan yang kemudian input ini diproses oleh lembaga-lembaga negara yang hasilnya berupa output atau kebijakan-kebijakan yang otoritatif (mengikat) masyarakat selaku warga negara.

Input dalam sistem politik terbagi dua yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang menjadi bahan baku (bahan mentah) atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu.

1. Input tuntutan (*demand*) adalah keinginan atau kalimat yang disampaikan atau dibuat oleh anggota-anggota masyarakat yang menginginkan nilai-nilai atau sumber daya yang lebih besar misalnya kekayaan, keamanan, status dan lain-lain. Tidak semua keinginan dari masyarakat dikatakan sebagai input, hanya *demand* yang disuarakan oleh sekelompok orang yang berharap agar keinginan itu diproses oleh sistem secara otoritatif, yang bisa dikatakan sebagai input. Suatu Tuntutan berasal dari :
 - a. Dari lingkungan eksternal, yakni tuntutan dari sistem-sistem diluar sistem politik seperti sistem ekonomi, budaya, struktur sosial, ekologi dan demografi;
 - b. Dari lingkungan internal, yakni tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi-situasi yang terjadi di dalam suatu sistem politik. Misalnya, perubahan dalam proses pengangkatan pemimpin-pemimpin formal, perubahan cara amandemen konstitusi.
2. Input dukungan (*support*) merupakan bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan, mempromosikan, mempertahankan dan merintangi sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Support bisa berupa support terbuka (*over support*) dan support tertutup (*covert support*). Output berasal dari sistem politik dalam bentuk keputusan atau kebijaksanaan publik. Output-output yang berwujud keputusan-keputusan politik merupakan pendorong bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung/atau tidak mendukung sistem itu. Output yang merupakan hasil dari sistem politik tidak menutup kemungkinan akan menjadi input baru dari sistem tersebut/*feedback* (akibat adanya pengaruh dari lingkungan).

Struktur dan Fungsi Sistem Politik

Struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara. Untuk itu struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Struktur politik dapat diklasifikasikan menjadi bangunan yang nampak jelas (konkrit) dan juga tidak jelas.

Struktur Politik terdiri dari :

1. Suprastruktur politik (mesin politik formal) adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara. Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik formal meliputi : Lembaga Eksekutif; Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif.
2. Infrastruktur politik (mesin politik informal) adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. Infrastruktur politik meliputi : (1) Partai Politik; (2) Kelompok Kepentingan; (3) Kelompok Penekan dan Media Massa.

Fungsi Suprastruktur dan Infrastruktur politik yaitu :

1. Fungsi Suprastruktur politik

Fungsi struktur lembaga ini menurut Gabriel Almond yang biasa pula disebut fungsi input politik adalah meliputi :

- a. Pembuatan undang-undang (*rule making*). Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga Legislatif yang meliputi DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah.
- b. Melaksanakan undang-undang (*rule application*). Fungsi yang kedua ini adalah fungsi pelaksana terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislative sebagaimana termaktub dalam rule making. Badan ini adalah merupakan badan Eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.
- c. Mengadili pelaksana undang-undang (*rule adjudication*). Badan yang memiliki fungsi yang ketiga ini adalah badan peradilan yang meliputi MA, MK, Komisi Yudisial serta badan-badan kehakiman.

2. Fungsi Infrastruktur Politik

- a. Sosialisasi politik dan pendidikan politik. Fungsi ini adalah fungsi untuk peningkatan pengetahuan politik masyarakat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Media sosialisai dan pendidikan politik antara lain : keluarga, lingkungan, media massa, dll.
- b. Artikulasi kepentingan. Menunjuk pada kemampuan individu masyarakat untuk secara jelas dan tegas merumuskan tuntutan mereka. Lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat, antara lain : kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*).
- c. Agregasi kepentingan. Merupakan upaya untuk menyatukan tuntutan dan kepentingan yang dirumuskan pada tataran individual menjadi tuntutan atau kepentingan kelompok. Lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Lembaga yang memiliki fungsi ini adalah Partai Politik.
- d. Komunikasi politik. Adalah proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator ke komunikasi. Komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat. Media komunikasi politik meliputi : partai politik dan media massa
- e. Rekrutmen politik. Menunjuk kepada proses pengaktifan warga Negara biasa kedalam proses politik. Rekrutmen politik adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.

Model-model Sistem Politik

Ramlan Surbakti mengutip pendapat Carter dan Herz menggunakan 2 kriteria untuk membedakan berbagai sistem politik, yakni :

1. Siapa yang memerintah.

Apabila yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem pemerintahan ini disebut pemerintahan “dari atas” atau disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik tersebut demokratis.

2. Ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintahan.

Apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maka rezim ini disebut totaliter, sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah, kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.⁴⁵

Surbakti juga menjelaskan bahwa model sistem politik dari sudut historis dan perkembangan sistem politik terdiri dari beberapa macam, antara lain :

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional

Ciri-ciri :

- a. Kurang menekankan pada persamaan tetapi menekankan pada stratifikasi ekonomi
- b. Kebebasan politik individu kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa.
- c. Kebutuhan moral dan nilai-nilai moral lebih menonjol dari pada kebutuhan materil, dan lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan dari pada individualisme.

2. Sistem Politik Totaliter

Ciri-ciri :

- a. Menekankan konsensus total di dalam masyarakat, tetapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam maupun di luar negeri.
- b. Sistem Politik ini pada dasarnya di bedakan menjadi dua yaitu, Komunis dan Fasis. Ciri-ciri umum Totaliter: (1) menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh (total) atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan, (2) merupakan sistem mobilisasi massa dalam rangka membentuk manusia dan masyarakat baru dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, (3) menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatasnamakan bangsa dan negara.
- c. Komunisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum ploretar (pekerja). Komunisme mendasarkan diri pada ideologi komunisme yang doktriner dan bersifat eskatologis (masyarakat tanpa kelas, sama rata dan sama rasa).
- d. Fasisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal yang sangat nasionalistik, rasionalistik. Militeristis dan imrealistis.

3. Sistem Politik Otoriter

Menurut Peter Schroder, sistem otoriter memiliki persamaan dengan sistem totaliter, yaitu bahwa keduanya tidak demokratis. Yang termasuk sistem otoriter adalah diktator militer kiri maupun kanan.

Ciri-ciri :

- a. Sistem politik yang otoriter, paternalistik, serta nepotistik, yang juga berdasarkan pada pola *patron-client* menyebabkan militer menjadi pengayom hampir semua kegiatan politik.
- b. Struktur keamanan mereka ikut mengawasi birokrasi dengan model struktur pemerintahan ganda atau bayangan.

4. Sistem Politik Demokrasi

⁴⁵ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 221.

Model sistem politik ini memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya dalam sistem ini dimungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, atau diantara lembaga-lembaga pemerintah, sepanjang perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan itu tidak menghancurkan sistem. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme yang mengatur bagaimana menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk konsensus.

Ciri-ciri :

- a. Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya.
- b. Doktrin yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi adalah persatuan dalam perbedaan.
- c. Terdapat distribusi kekuasaan di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan.
- d. Legitimasi kewenangan dalam sistem ini bersifat prosedural (*rule of law*) yang diatur dalam undang-undang.
- e. Koordinasi unit ekonomi, merupakan tanggungjawab pemerintah dan swasta.

Untuk uraian dinamika kepartaian sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan dengan baik dan sistematis tentang model-model sistem politik yang ada dalam kehidupan perpolitikan!
2. Jelaskan dengan baik tentang macam-macam model sistem politik, definisi masing-masing, serta ciri-cirinya !
3. Jelaskan dengan baik tentang sistem politik yang berkembang di berbagai negara.

Paket 9

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada pengetahuan tentang sistem pemerintahan yang berkembang diberbagai negara di dunia, dimana materi ini merupakan kelanjutan dari paket 8 sebelumnya. Pembahasan dalam paket ini mencakup beberapa sistem pemerintahan, antara lain sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial yang tengah berkembang di berbagai negara di dunia. Paket ini merupakan materi inti agar mahasiswa memahami tentang sistem pemerintahan yang diimplementasikan di berbagai belahan dunia, baik di benua Asia, Afrika, Amerika dan Eropa.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh tentang berbagai macam sistem pemerintahan yang ada di dunia yang antara lain, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial dengan berbagai contoh konkret negara mana yang masuk kategori dua sistem pemerintahan yang ada dengan mempertimbangkan selama relevan dan mendukung terhadap tema tentang sistem pemerintahan politik ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam menangkap model sistem pemerintahan yang berkembang hingga saat ini. Dari konsep dan ilustrasi faktual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial dalam kehidupan politik di berbagai negara di dunia.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan sistem pemerintahan parlementer
2. Menjelaskan sistem pemerintahan presidensial

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan presidensial

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan gambar tentang model-model sistem pemerintahan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Problem base teaching materi pokok tentang sistem pemerintahan
2. Memetakan materi pokok tentang sistem pemerintahan (reading guide)
3. Presentasi hasil membaca
4. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau menyampaikan konfirmasi.
5. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
4. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas membaca materi paket 10 tentang trias politica, pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi tentang model-model sistem pemerintahan yang terdiri dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan tentang model-model sistem pemerintahan yang terdiri dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Bahan dan alat

Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus

Langkah-langkah kegiatan

1. Mahasiswa secara individual dan random, mengeksplorasi beberapa gambaran tentang model-model sistem pemerintahan.
2. Perhatikan gambaran materi powerpoint yang ditayangkan oleh dosen dalam slide melalui tampilan di screen.
3. Berikan respon verbal atas beberapa gambaran tentang kajian model-model sistem pemerintahan dalam screen.
4. Perhatikan teks tentang berbagai sistem pemerintahan dalam kehidupan bernegara di berbagai negara di dunia sebagaimana yang ada di screen !

Uraian Materi

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEментар DAN PRESIDENSIAL

Pendahuluan

Dalam mempelajari sistem pemerintahan terkait dengan lembaga eksekutif, ada dua sistem besar yang dipakai di dunia, yaitu sistem pemerintah parlementer dan sistem pemerintah presidensial. Perbedaan utama dari sistem ini adalah kepala pemerintahan, dimana sistem presidensial dipimpin oleh seorang presiden, sementara sistem parlementer dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republikpresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer antara lain adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ada beberapa ciri dari sistem pemerintahan presidensial yang dipetakan dalam bentuk tabel, agar dengan mudah dibedakan antara penerapan di satu negara dengan negara yang lain.

Pendalaman teori	Republik konstitusional			Monarki konstitusional
	Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden			Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri		
Sifat kepala negara	Populer		Sereimonial	
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Sereimonial	Populer	
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)			seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	tidak ditentukan jangka waktu		
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden	Perdana Menteri		
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden	Perdana Menteri		
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden	Perdana Menteri		
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya			tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya		
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak		ya	
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional		Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)	
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak		ya	
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)			dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak memilih	ya			tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak memilih/anggota eksekutif	ya			tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu			hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya			tidak
Pengusulan/Pengubah/Penganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden	Perdana Menteri		
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)			diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan			Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya		
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum			pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara			dianggap bangsawan/geda]
Pemilihan parlemen	tepat waktu	berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri		

Ciri-ciri Pemerintahan Parlemen

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlemen, antara lain :

- a. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

- b. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- c. Perdana menteri memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- f. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Parlementer

- a. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
- d. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- e. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- f. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- g. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
- h. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Penyebab Kegagalan Pemerintahan Parlementer

- 1. Kepala negara memperoleh kekuasaan penuh
- 2. Parlemen bubar
- 3. Ada kekuatan di luar parlemen yang mengatur suara parlemen.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "Trias Politica" oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem presidensial merupakan

sistem pemerintahan negara republik, dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 2 unsur yaitu :

- a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Indonesia, dan sebagian besar Negara Amerika latin.

Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan-perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial, dan sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislatif. Presiden menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR.

Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, "pemegang" kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif, sedangkan presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan presiden menyusun undang-undang. DPR dan presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial.

Sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Sehingga para anggota legislatif bisa lebih independent dalam membuat UU karena tidak khawatir dengan jatuh banggunya pemerintahan. Sistem presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas pemerintahan, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas. Adapun kekurangannya, kemandekan (deadlock) eksekutif-legislatif, kekakuan temporal, dan pemerintahan yang lebih eksklusif.

Secara konstitusional, DPR mempunyai peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial mengandalkan pada individualitas. Sistem pemerintahan presidensial bertahan pada citizenship yang bisa menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk memerankan diri memformulasikan aturan main dan memastikan janji presiden berjalan. Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres.

Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

- a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Penyelenggara negara berada ditangan presiden.
- b. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
- c. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- d. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- e. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
- f. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
- g. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- h. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- i. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- j. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara Dan Pemerintahan

Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

Kepala negara adalah orang yang mengepalai negara dan sebagai symbol resmi negara Indonesia di dunia yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstitusi.
2. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.
3. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
4. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.
5. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.
6. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.
7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang- Undang.
8. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
9. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
10. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.
11. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
12. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih DPR atas dasar pertimbangan DPD.
13. Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.

Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Menjalankan roda pemerintahan dengan di bantu oleh para menteri dan stafnya
2. Menetapkan peraturan pemerintah
3. Mengajukan rancangan Undang-Undang

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
4. Karena presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, maka sistem pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas.
5. Bisa menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif.

Tabel Perbedaan antara Sistem Presidensial dan Parlementer

Perbedaan	Sistem Pemerintahan Presidensial	Sistem Pemerintahan Parlementer
Kepala Negara	Presiden	Presiden
Kepala Pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Masa Jabatan Kepala Pemerintahan	ditentukan Jangka Waktu	Tidak ditentukan Jangka Waktu
Hak Prerogatif Eksekutif	Presiden	Perdana Menteri
Hak Prerogatif Legislatif	Presiden	Perdana Menteri
Hak Pendapat Menurut UUD/diberlakukan/dicabut	Presiden	Perdana Menteri
Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif	tidak	Ya
Eksekutif dijatuhkan oleh legislatif	tidak	Ya
Posisi Eksekutif	Parpol dan Profesional	Hanya partai berkuasa
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak	ya
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/Perundang-undangan bersama dengan legislatif	Presiden	Perdana Menteri
Hukuman kepada Kepala Pemerintahan	Pemakzulan	Mosi Tidak Percaya

Syarat-syarat Negara Presidensial yang Stabil

1. Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat
2. Presiden harus dipilih untuk masa jabatan tertentu
3. Presiden tidak bisa membubarkan atau mengurangi kekuasaan parlemen

Penyebab Kegagalan Pemerintahan Presidensial

1. Munculnya demokrasi kaesarisme (eksekutif sangat berkuasa dan legislatif lemah)
2. Militer memperoleh kekuasaan politik
3. Eksekutif bisa mengatur suara dari parlemen

Untuk uraian dinamika kepartaian sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan dengan baik dan sistematis tentang model-model sistem pemerintahan yang ada dalam kehidupan perpolitikan!
2. Jelaskan dengan baik tentang macam-macam model sistem pemerintahan, definisi masing-masing, ciri-ciri, kelebihan dan kelemahannya !
3. Jelaskan dengan baik tentang sistem pemerintahan yang berkembang di berbagai Negara !

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Studi Ilmu Politik ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Sunan Ampel Tahun 2013 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6). Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

2. Tugas

Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

4. *Performance*

Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2)

penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	– 1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

- a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
- b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
- c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTS \times 20) + (NT \times 30) + (NUAS \times 40) + (NP \times 10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester

NT = Nilai Tugas

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NP = Nilai Performance

- d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
- e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta, 2000
- Ayubi, N., Ayyubi, *Political Islam, Religion and Politics In The Arab World*, Routledge, New York, 1991
- Amal, Ichlasul dan Budi Winarno, *Metode Ilmu Politik*, PAU Studi Sosial UGM, 1990
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1999
- Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1980
- Fadulullah, Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik, Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*, CV. Ramadhani, Solo, 1991
- George Sorenson, *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta, 2003
- Lidphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Mas'ood, Mochtar dan Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1995
- Rusli, M., Kariem, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali Jakarta, 1983
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992.
- Tower Sargent, Lyman, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer (Sebuah Analisis Komparatif)*, PT. Erlangga, 1987

Curriculum Vitae Penulis



Muhdi atau lengkapnya Ali Muhdi adalah Dosen di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fak. Adab UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau lahir dan besar di Pamekasan Madura. Sejak kecil beliau hidup dan berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar,

Riwayat pendidikannya, SD Negeri (1983) Madrasah Ibtidaiyah (1983), MTs (1987), MA (1990). Jenjang sekolah tersebut dia selesaikan di Ponpes Banyuanyar. Pasca lulus MA, 3 tahun dia menjalani tugas pesantren dalam bentuk pengabdian masyarakat yakni mengajar RA/TK, MI, MTs dan MA di beberapa daerah di seluruh Madura. Pasca pengabdian, beliau kemudian melanjutkan studi SI di IAIN Sunan Ampel Pamekasan (1997) dan kemudian melanjutkan S2 Prodi Ilmu-ilmu Sosial di Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya (2004).

Beliau meniti karir akademik di IAIN Sunan Ampel yang kini menjadi UIN Sunan Ampel sejak tahun 2005 hingga saat ini. Selain aktifitas mengajar, beliau juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah. Beberapa buku yang pernah terbit antara lain, Revitalisasi Pendidikan Pancasila sebagai Pemandu Reformasi (2011) dan edisi revisi (2012) bersama Tim, Pancasila dan Civic Education dalam Bingkai Rahmatan Lil'Alamin kerjasama IAIN Sunan Ampel dengan SILE (bersama Tim), Tim Editor Kitab Emas Walisongo.

Beliau juga hobby menulis di beberapa koran dan majalah baik lokal maupun nasional, seperti koran harian Surya, Jawa Pos dan Kompas. Beliau juga aktif melakukan riset akademik baik individual maupun kolektif di internal kampus maupun hasil kerjasama dengan Pemkot Surabaya dan Pemprop Jawa Timur.

Beliau adalah sosok aktivis organisasi sejak kecil hingga sekarang. Beberapa jabatan publik pernah beliau jalani, antara lain Sekretaris Umum KIPP Pamekasan (1999), Sekretaris Eksekutif DPD REI Jawa Timur (2005-2009), Lajnah Tanfidz wa Nasyr PWNU Jawa Timur (2008-2013).



ILMU POLITIK



Penerbit UIN Sunan Ampel Press
Gedung SAC, Lt.2 UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No.117 Surabaya
Telp : (031) 8410298 - ext.138
E-mail: sunanampelpress@yahoo.co.id

ISBN 978-602-7912-99-1

